



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA CIMAHI

• PEMERINTAH KOTA CIMAHI

2025

-

2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, serta indikator kinerja perangkat daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Cimahi.

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi 2025–2029 serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan urusan pangan, pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan daerah. Dokumen ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan sektor pangan dan pertanian, baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, maupun evaluasi kinerja.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, serta dukungan dalam proses penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan peningkatan ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani, penguatan sistem pertanian berkelanjutan, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas di Kota Cimahi.

Akhirnya, kami berharap Renstra ini dapat dilaksanakan secara konsisten, kolaboratif, dan berkesinambungan untuk terwujudnya pembangunan pangan dan pertanian yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing demi kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi.

Cimahi, 30 September 2025

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA CIMAHI



TITA MARIAM, S.Pt, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197007061998032006

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana yang di amanatkan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan Tata Cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan baik dalam Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat ditingkat Pusat dan Daerah.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, dimana salah satu agendanya adalah untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi untuk periode 2025-2029. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi pada tanggal 9 Januari 2025 menetapkan pasangan Ngatiyana - Adhitia Yudhistira sebagai Wali kota dan Wakil Wali kota Cimahi periode 2025-2029 dan telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025.

Seiring dengan dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali terpilih maka sesuai dengan pasal 264 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka penyusunan RPJMD wajib diselesaikan dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, program prioritas, program perangkat daerah dan keuangan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan

berpedoman pada dokumen perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu di dukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan Visi dan Misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun melalui proses tertentu untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi 2025 – 2029 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi tahun 2025-2029 yang didasarkan pada hasil evaluasi pencapaian target kinerja sampai dengan tahun 2024, penyelarasan indikator kinerja serta perubahan proyeksi target sampai dengan tahun 2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan Inmen No. 2 Tahun

2025. Renstra merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Perangkat Daerah hingga 5 (lima) tahun mendatang. Renstra merupakan suatu alat manajemen yang berfungsi membantu Perangkat Daerah membuat rencana masa depan jangka menengah. Rencana strategis dapat dilihat sebagai formulasi secara menyeluruh atau "*Road Map*" yang menjelaskan bagaimana usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan melalui penerapan strategi- strategi yang dipilih, bersifat luwes dan dapat direvisi, terutama apabila terdapat perubahan- perubahan yang signifikan dalam lingkungan internal dan eksternal yang berpengaruh pada pencapaian tujuan rencana semula.

Pentingnya menyusun sebuah dokumen Renstra adalah memungkinkan bagi Perangkat Daerah untuk menetapkan prioritas dan memanfaatkan berbagai peluang, menjadi kerangka kerja untuk memperbaiki koordinasi dan pengendalian aktivitas, meminimalkan pengaruh kondisi atau perubahan lingkungan yang merugikan, memungkinkan keputusan utama yang lebih baik dalam mendukung sasaran yang telah ditentukan, memungkinkan alokasi sumber daya secara efektif dan efisien dan menyediakan pendekatan kerjasama, terpadu dalam menangani masalah guna mencapai tujuan.

Renstra PD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra PD yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan tujuan, sasaran, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Selanjutnya Renstra SKPD akan menjadi pedoman Perangkat Dinas saat menyusun Rencana Kerja (Renja)

PD yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Penyusunan Renstra telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan unsur Pimpinan, Pejabat struktural, fungsional dan para staf terkait serta masyarakat yang mampu memberikan masukan serta pemangku kepentingan lainnya. Selain itu Penyusunan Renstra telah memperhatikan Renstra OPD terkait Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Rencana strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (cara untuk mencapai tujuan dan sasaran) yang berfungsi menjabarkan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025 - 2029 di bidang urusan wajib Ketahanan pangan dan urusan pilihan Pertanian, peternakan, Kelautan dan Perikanan.

RENSTRA Dispangtan pada t a h u n 2025-2029, disusun sebagaimana halnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan perangkat daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif, yang disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Cimahi.

Secara umum Renstra Dinas Pangan dan Pertanian

secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yaitu : (1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya, dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai.

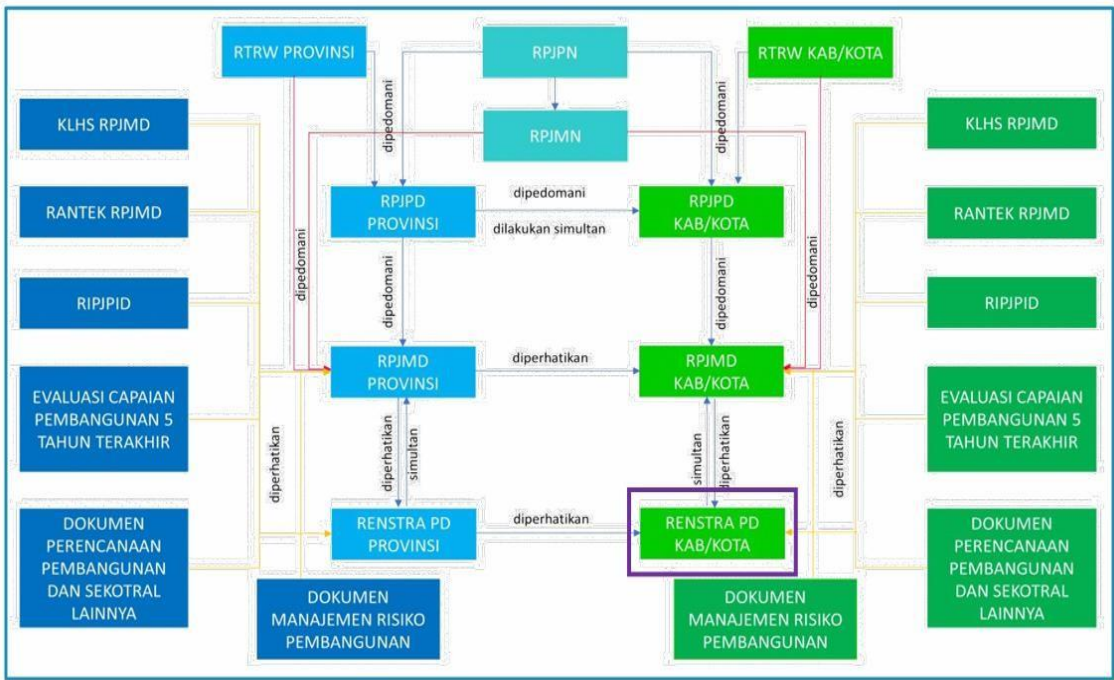
Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Selain itu, penyusunan dokumen ini menggunakan beberapa pendekatan teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah:

1. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
2. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, hingga nasional.

Secara ringkas, keterkaitan antara RPJMD dengan rangkaian dokumen RENSTRA Perangkat Daerah dapat digambarkan secara sistematis dalam bentuk diagram alir (hal ini dapat dilihat pada gambar 1.1).

Gambar 1.1
Bagan Hubungan Dokumen RPJMD dengan
Dokumen Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri, 2025

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan RENSTRA Dispangtan Kota Cimahi Tahun 2025-2029 berdasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-undang Nomor 10 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembar Negara Nomor 6866);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembar Negara Nomor 6056);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan pangan;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;
18. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah;
19. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang percepatan panganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal, yang sejalan dengan prinsip B2SA;
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2025 Nomor 19);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung Dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi Dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung Dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau;
 28. Inmen No. 2 Tahun 2025 adalah tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025 – 2029;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
 31. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 64);
 32. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
 33. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2017-2047;
 34. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi 2025-2029 tanggal 19

Agustus 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 312, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69).

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen RENSTRA Kota Cimahi Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arah pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 untuk mewujudkan Visi, Misi dan Sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2025 – 2029 dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menghasilkan dokumen perencanaan yang transparan dan akuntabel.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi tahun 2024- 2029 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan strategis yang menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Cimahi dengan Dinas Pangan dan Pertanian, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi;
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi yang memandu arah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Cimahi sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan

- kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; dan
4. Memudahkan seluruh jajaran pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi disusun mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 2025–2029 yang sistematikanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat gambaran kondisi Dinas Pangan dan Pertanian secara umum meliputi gambaran pelayanan, tugas fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, tantangan dan peluang pelayanan perangkat daerah, capaian

kinerja perangkat daerah, capaian per urusan perangkat daerah, permasalahan dan isu strategis dan sasaran pelayanan perangkat daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat Visi dan Misi, serta Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025-2029. Pada bagian ini juga terdapat subbab strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pada bagian ini juga memuat subbab target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi.

BAB V PENUTUP

Memuat uraian mengenai berbagai kesimpulan penting yang bersifat substansial terkait perencanaan

pembangunan daerah. Di dalamnya dijabarkan kaidah-kaidah pelaksanaan, mekanisme pengendalian, serta proses evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Seluruh pembahasan dalam bab ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah secara efektif, terukur, dan berkesinambungan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan

Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun melalui proses tertentu untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Perangkat daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota tersebut maka Dinas Pangan dan Pertanian melaksanakan Tugas Pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah kota., sedangkan Fungsi Dinas Pangan dan Pertanian adalah:

1. Perumusan kerangka regulasi, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pangan, pertanian dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian dan perikanan;

3. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pangan, pertanian dan perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas Pangan dan Pertanian; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Susunan organisasi Dinas Pangan dan Pertanian terdiri dari :

1. Sekretariat;
2. Bidang Ketahanan Pangan;
3. Bidang Pertanian dan Perikanan;
4. UPTD; dan
5. Kelompok jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas dibantu Sekretaris, Kepala Bidang, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional lainnya, dapat diuraikan tugasnya sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas meliputi urusan umum, perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, fungsi sekretariat adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan kerja organisasi perangkat daerah;
- Melaksanakan tata urusan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- Melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program;
- Melaksanakan penyusunan anggaran dan penatausahaan serta menyusun pertanggungjawaban keuangan;
- Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- Perencanaan operasional bidang ketahanan pangan;
- Pengelolaan urusan Pemerintahan bidang ketahanan pangan;
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Fungsi :

- Perencanaan kegiatan ketersediaan dan kerawanan pangan;
- Penyusunan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat ketersediaan pangan;
- Menganalisis ketersediaan dan keragaman produk pangan;
- Melaksanakan pengembangan sumberdaya pangan biotik dan abiotik;
- Menyusun data dan informasi sumberdaya pangan;
- Menyusun data dan informasi kerawanan pangan;
- Mengembangkan kemandirian pangan;
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan ketersediaan dan kerawanan pangan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan.

Fungsi :

- Perencanaan kegiatan distribusi dan cadangan pangan;
- Melaksanakan pembinaan peningkatan jaringan distribusi pangan;
- Mengkaji pola pengembangan cadangan pangan masyarakat;
- Melaksanakan pembinaan, penyediaan, penyaluran cadangan pangan pokok;
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan distribusi dan cadangan pangan;

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Fungsi :

- Perencanaan kegiatan distribusi dan cadangan pangan;
- Mengidentifikasi pangan pokok masyarakat;
- Mengkaji pengembangan konsumsi pangan lokal;
- Meningkatkan pemanfaatan pangan khas daerah dan produk olahannya sebagai sumber karbohidrat selain beras dan terigu;
- Pengawasan dan pembinaan, evaluasi dan pelaporan keamanan pangan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pertanian dan Perikanan

Fungsi :

- Perencanaan operasional bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- Pengelolaan urusan Pemerintahan bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pertanian, peternakan dan perikanan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Pertanian.

Fungsi :

- Perencanaan kegiatan urusan pertanian bidang pertanian ;
- Pelaksanaan urusan pertanian bidang pertanian ;
- Pelaksanaan pembagian tugas dan mengontrol urusan perencanaan teknis pertanian bidang pertanian ;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

- Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha.
- Menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan.

b. Seksi Perikanan.

Fungsi :

- Perencanaan kegiatan urusan kelautan dan perikanan;
- Pelaksanaan urusan perikanan;
- Pelaksanaan pembagian tugas dan mengontrol urusan perencanaan teknis perikanan;
- Menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan urusan perikanan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Peternakan

Fungsi :

- Perencanaan kegiatan urusan peternakan dan kesehatan hewan bidang peternakan;
- Pelaksanaan urusan peternakan dan kesehatan hewan;
- Pelaksanaan pembagian tugas dan mengontrol urusan perencanaan teknis peternakan dan kesehatan hewan;
- Menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan urusan peternakan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)

Fungsi :

- Perencanaan operasional kegiatan Pusat Kesehatan Hewan;
- Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, pengelolaan kepegawaian dan keuangan UPTD;

- Pelaksanaan operasional kegiatan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Pusat Kesehawatan Hewan;
- Pelaksanaan operasional kegiatan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pusat kesehatan hewan ;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

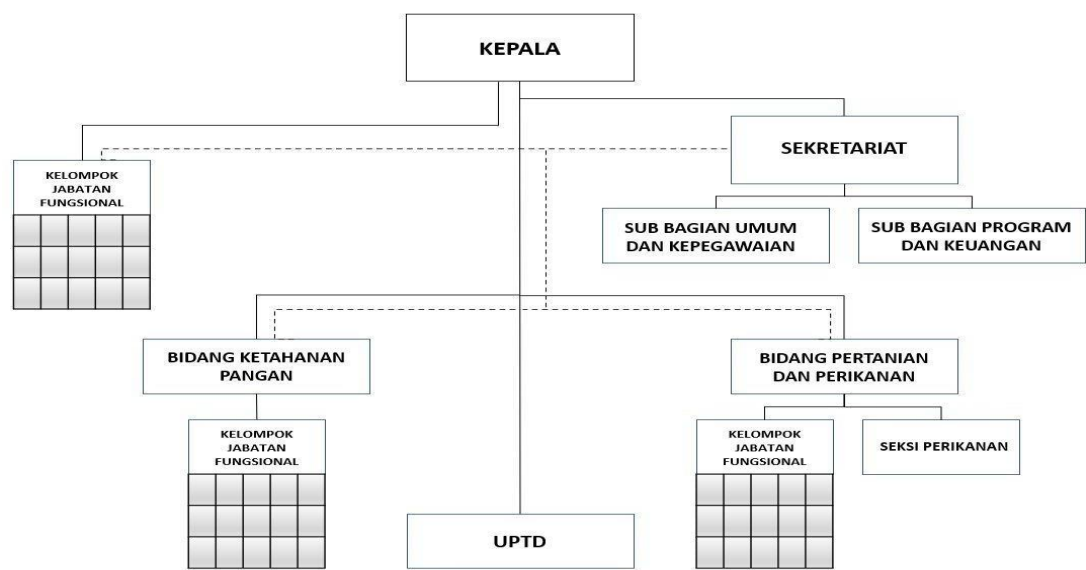
5. UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT)

Fungsi :

- Perencanaan operasional kegiatan balai benih ikan air tawar;
- Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, pengelolaan kepegawaian dan keuangan UPTD;
- Pelaksanaan operasional kegiatan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas balai benih ikan air tawar;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi



Pergantian jabatan eselon IV dengan jabatan fungsional terjadi sebagai bagian dari kebijakan penyederhanaan birokrasi di Indonesia.

Jabatan eselon IV, yang sebelumnya merupakan jabatan struktural pengawas, dialihfungsikan menjadi jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 dan peraturan terkait lainnya. Kebijakan ini dilakukan untuk menciptakan ASN yang lebih profesional dan berbasis kinerja, dengan karier yang dapat berkembang melalui jenjang fungsional seperti ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya.

Pergantian dari jabatan Eselon IV ke jabatan fungsional di lingkungan pemerintahan Indonesia merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme dalam pelayanan publik. Pergantian ini terjadi seiring dengan upaya untuk menyederhanakan struktur organisasi pemerintah serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian indikator-indikator program dan kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian tentu sangat dipengaruhi oleh daya dukung sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya sarana dan prasarana dan sumber daya kemitraan/kolaborasi (crosscutting).

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi per 30 Desember 2024 adalah sebanyak 78 orang, yang terdiri dari ASN dan PPPK sebanyak 51 orang, tenaga THL 26 orang dan THL Provinsi sebanyak 1 orang.

Efisiensi SDM (Sumber Daya Manusia) merupakan tantangan di dalam perangkat daerah. Krisis pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi dan tingkat pekerjaan yang semakin menumpuk harus bisa membangun kinerja dengan penggunaan waktu dan sumber daya yang efektif. Efisiensi SDM, tidak hanya mengatur jumlah tenaga kerja di setiap posisi. Namun, efisiensi SDM juga tentang pencapaian seluruh aspek tugas pokok dan fungsi suatu perangkat daerah. Dapat diasumsikan jika produktifitas sumber daya manusia pada suatu perangkat daerah tinggi, maka efisiensinya juga akan tinggi. Dapat

dihitung juga dengan membandingkan antara input dan output. Namum, selain SDM banyak juga faktor yang bisa mempengaruhi produktivitas. Diantaranya yaitu : waktu dan biaya serta kondisi lingkungan.

Kinerja perangkat daerah tentu saja harus didukung oleh ASN yang berkualitas, kompeten, berdisiplin dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Maka dibutuhkan reward dan Punishment yang merupakan salah satu strategi dalam peningkatan kinerja ASN. Reward merupakan bentuk pengakuan atau penghargaan kepada karyawan sebagai respons atas pencapaian atau perilaku sesuai ketentuan perangkat daerah. Adanya reward bertujuan untuk meningkatkan motivasi karyawan, meningkatkan kinerja, mempertahankan karyawan yang berprestasi, dan meningkatkan kepuasan kerja. Sementara itu, punishment merupakan hukuman atau sanksi kepada karyawan sebagai respons atas perilaku yang tidak sesuai atau pelanggaran aturan. Punishment bertujuan untuk mengurangi atau mencegah perilaku yang tidak diinginkan, meningkatkan disiplin, dan memastikan karyawan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi memiliki sumber daya aparatur sebanyak 69 aparatur. Sumber daya aparatur yang dimiliki tersebut tampak pada Tabel berikut

Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur Dispangtan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Ruang

No	Jenis Kelamin	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Laki-Laki	-	6	16	2	24
2	Perempuan	-	2	11	6	19
	Jumlah	-	8	27	8	43

Sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan dan jenis kelamin tampak pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Sumber Daya Aparatur Dispangtan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Kualifikasi Pendidikan				Jumlah
		SMA	DIII	S1	S2	
1	Laki-Laki	8	2	11	3	24
2	Perempuan	1	3	11	10	25
	Jumlah	9	5	20	11	49

Tabel 2.3
Sumber Daya Aparatur Dispangtan Berdasarkan Eselon

No	Uraian	Eselon			Fungsional	Fungsional Umum	PPPK	Jumlah
		II	III	IV				
1	Sekretariat	1	1	1	-	5	3	13
2	Bidang Ketahanan Pangan		1	-	2	6	3	11
3	Bidang Pertanian dan Perikanan		1	1	7	5	6	20
4	UPTD. Puskesmas	-	-	2	1	2	3	8
5	UPTD. BBIAT	-	-	2	-	4	4	10
	Jumlah							62

2. Sarana dan Prasarana

Kinerja yang baik tentu saja harus didukung oleh sarana prasarana penunjang kinerja yang baik. Ketersediaan sarana dan prasarana di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi beserta kondisinya bisa dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Kondisi Sarana prasarana Dispangtan Per akhir Desember Tahun 2024

No.	Jenis Peralatan		Jumlah	Keterangan Kondisi	Jumlah Kebutuhan	Ket.
1.	Alat Berat					
	1.	Pompa Air	3 Unit	Baik		
	2.	Pompa Airasil	-	-	-	
	3.	Pompa Lain-lain	3 Unit	Baik		
	4.	Portable Water Pump	-	-		
	5.	Tractor Lain-lain	2 Unit	Baik		
	6.	Transportable Water Pump	-	-	-	
2.	Alat Angkutan					
	1	Roda 4	4 Unit	Baik		
	2	Roda 3	2 Unit	2 Rusak Berat		
	3	Roda 2	4 Unit	Baik		
3.	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga :					
	1	AC	13 Unit	1 Unit Rusak	18 Unit	
	2	Air Blower	2 Unit	Baik		
	3	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1 Unit	Baik		
	4	Alat Kedokteran Poliklinik Lain-lain	17 Unit	Baik		
	5	ALat Kedokteran Umum Lain Lain	14 Unit	Baik		
	6	Alat Laboratorium Lainnya (Lain-Lain)	1 Unit	Baik		
	7	Alat Laboratorium Pertanian Lain-lain	3 Unit	Baik		
	8	Alat Laboratorium Umum Lain-lain	3 Unit	Baik		
	9	Alat Panen/Pengolahan Lain-lain	2 Unit	Baik		
	10	Alat Pasca Panen Lain-lain	4 Unit	Baik		
	11	Alat Pemadam Kebakaran (Alat Laboratorium Pertanian Lain-lain)	73 Unit	Baik		
	12	Alat Pemadam/Portable	1 Unit	Baik		
	13	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	30 Unit	Baik		
	14	Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	22 Unit	Baik		
	15	Alat Pengering (Dryer)	1 Unit	Baik		
	17	Alat Pengukur Curah Hujan	1 Unit	Rusak		
	18	Alat Pengukur P.H. Tanah (Soil Tester)	4 Unit	Baik		
	19	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	3 Unit	Baik		
	20	Alat Perontokan (Thresher Pedal)	5 Unit	Baik		
	21	Alat Perontokan Mesin (Power Thresher)	1 Unit	Baik		
	22	Alat Processing Lain-lain	1 Unit	Baik		
	23	Alat Produksi Perikanan Lain-lain	9 unit	Baik		
	24	Alat Rumah Tangga Lain-lain	6 Unit	Baik		
	25	Alat Timbangan Lain-lain	10 Unit	Baik		
	26	Alat Ukur	1 Unit	Baik		
	27	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	3 Unit	Baik		
	28	Alat-alat Peternakan Lain-lain	12 Unit	Baik		
	29	Angkutan Barang Lain-lain	2 Unit	2 Unit Rusak	1 Unit	
	30	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	49 Unit	Baik		
	31	Bak Aquarium	40 Unit	Baik		
	32	Bak Fiberglass	27 Unit	Baik		
	33	Bak Pemeliharaan Sementara	18 Unit	Baik		
	34	Beater Unit (Mesin Penggiling)	1 Unit	Baik		
	35	Binocular Microscope (Alat Laboratorium Microbiologi)	1 Unit	Baik		
	36	Brandkas	1 Unit	Baik		
	37	CCTV dan Perlengkapannya	3Tempat	Baik		
	39	Centrifuge	1 Unit	Baik		
	40	Coffee Maker	1 unit	Baik		
	41	Container	1 Unit	Baik		
	42	CPU (Peralatan Personal Komputer)	3 Unit	Baik		
	43	Desicator	2 Unit	Baik		
	44	Disk Pack (Peralatan Mini Komputer)	1 Unit	Baik		

No.	Jenis Peralatan		Jumlah	Keterangan Kondisi	Jumlah Kebutuhan	Ket.
	45	Dispenser	3 Unit	Baik		
	46	Display (Rak)	2 Unit	Baik		
	47	Electric Generating Set Lain-lain	1 Unit	Baik		
	48	Elemeyer Glass	4 Unit	Baik		
	49	Facsimile	2 Unit	Baik		
	50	Filing Cabinet Besi	17 Unit	Baik		
	51	Filter	1 Unit	Baik		
	52	Freezer (Alat Laboratorium Patologi)	1 unit	Baik		
	53	Freezer 70 Derajat C Centrifuge With Accesories	1 unit	Baik		
	54	Gas Regulator	4 Unit	Baik		
	55	Grinder	1 unit	Baik		
	56	Gunting Lurus	1 unit	Baik		
	57	Handy Cam	1 unit	Baik		
	58	Handy Talky (HT)	8 Unit	Baik		
	59	Kapal Terbang Sayap Tetap Mesin Turbin (Fuel Jet)	1 unit	Baik		
	62	Kipas Angin	1 Unit	Baik		
	63	Kitchen Set	2 Unit	Baik		
	64	Kursi Biasa	8 Unit	Baik		
	65	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2 Unit	Baik		
	66	Kursi Kayu	45 Unit	Baik		
	67	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4 Unit	Baik		
	68	Kursi Lipat	3 unit	Baik		
	69	Kursi Rapat	116 Unit	Baik		
	70	Kursi Tamu	2 Unit	2 Unit Rusak	3 Set	
	71	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1 Unit	Baik		
	73	Lap Top/ Note Book	11 Unit	Baik	15 Unit	
	74	Lemari Arsip (Besi & Kayu)	18 Unit	Baik		
	77	Lemari Es	8 Unit	Baik		
	80	Lemari Pakaian	3 unit	Baik		
	82	Magnetic Ferofilter	1 unit	Baik		
	83	Mayor Surgeri Set	1 unit	Baik		
	84	Meja Biro	19 Unit	Baik		
	85	Meja Kerja Besi/Metal	5 Unit	Baik		
	86	Meja Kerja Kayu	7 Unit	Baik		
	87	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	40 Unit	Baik		
	88	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3 Unit	Baik		
	89	Meja Makan Kayu	2 Unit	Baik		
	90	Meja Periksa Pasien	3 Unit	Baik		
	91	Meja Rapat	7 Unit	Baik		
	92	Meja Tambahan	2 Unit	Baik		
	93	Mesin Absensi	2 Unit	Baik		
	94	Mesin Bor Tangan	1 Unit	Baik		
	96	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	3 Unit	Baik		
	97	Mesin Las Listrik	1 Unit	Baik		
	98	Mesin Pemotong Rumput	2 Unit	Baik		
	99	Meubelair Lain-lain	1 Unit	Baik		
	100	Microscope	5 Unit	Baik		
	102	Minor Surgeri Set	3 Unit	Baik		
	103	Mixer	1 Unit	Baik		
	105	Mobile Operating Lamp	2 Unit	Baik		
	106	Nebulizer	1 Unit	1 Unit Rusak	3 Unit	
	107	Needle Holder	2 Unit	Baik		
	109	Operating Table Bedah	4 Unit	Baik		
	110	Oven	1 Unit	Baik		
	111	Overhead Projector	5 Unit	Baik		

No.	Jenis Peralatan		Jumlah	Keterangan Kondisi	Jumlah Kebutuhan	Ket.
	113	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	8 Unit	Baik		
	116	Peralatan Pemetaan Ukur Lain-lain	1 Unit	Baik		
	119	Perkakas Standar Lain-lain	1 Unit	Baik		
	121	Pesawat Telephone	3 Unit	3 Unit Rusak	1 Unit	
	122	PH Meter	2 Unit	Baik		
	123	Pick Up	1 Unit	Baik		Accessories Pick Up
	128	Printer (Peralatan Mini Komputer)	20 Unit	17 Unit Rusak	35 Unit	
	129	Rak Besi	12 Unit	Baik		
	130	Rak Kayu	1 Unit	Baik		
	131	Rak Pengering	1 Unit	Baik		
	132	Rak Peralatan	1 Unit	Baik		
	133	Refrigerator	1 Unit	1 Unit Rusak		
	134	Rice Cooker (Alat Laboratorium Makanan)	1 Unit	Baik		
	135	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2 Unit	Baik		
	138	Slicer	1 Unit	Baik		
	139	Slide Projector (Lapangan)	1 Unit	Baik		
	140	Sofa	5 unit	Baik		
	141	Sound System	2 unit	Baik		
	142	Stereo Generator Fm	1 Unit	Baik		
	143	Sterilisator	2 Unit	Baik		
	144	Tabung Gas	4 Unit	Baik		
	145	Tabung Oksigen	8 Unit	Baik		
	146	Tangga Aluminium	1 Unit	Baik	3 Unit	
	147	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2 Unit	2 Unit Rusak		
	148	Televisi	8 Unit	Baik		
	149	Tempat Tidur Kayu	3 Unit	Baik		
	150	Termos A.J	5 Unit	Baik		
	152	Timbangan	2 Unit	Baik		
	153	Timbangan Bayi	3 Unit	Baik	6 Unit	
	156	Tripod Camera	3 Unit	Baik		
	157	Tustel	2 Unit	Baik		
	158	USG	2 Unit	Baik	1 Unit	
	159	Vacum Pump	30 Unit	30 Unit Rusak		
	160	Water Filter	1 Unit	Baik		
	161	Water Quality Analyzer System (Tester Kit)	3 Unit	Baik		
	163	White Board	9 Unit	Baik		

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam periode sebelumnya sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi 2023 s.d 2026 dan Renstra Dispangtan 2023 s.d 2026 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan berdasarkan program-program strategis untuk mencapai visi dan misi pembangunan urusan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Secara umum pada indikator kinerja utama yang digunakan selama periode tersebut menunjukkan trend positif, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adapun matrikulasi realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama Dispangtan Tahun 2023-2024 sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
T.C.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dispangtan (IKU)
2023-2024

No .	Sasaran Strategis	Target	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun Ke-		Realisasi Capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian pada tahun ke-	
				1	2	1	2	1	2
1	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	IRB	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian	30	35	77,05	78,74	257	224
2	Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	PDRB	Nilai PPH Ketersediaan	2350	2350	2183	2186	92,89	93,02
			Skor PPH Ketersediaan	67,9	68	89,6	93,3	131,9	137,2
			Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian (Persen	1,32	1,32	1,55	3,80	117,4	287.8
3	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah		Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan	100	100	100	100	100	100

Tingkat capaian sasaran strategis ke 1 yang di ukur dari indikator **Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian**, jika dibandingkan dengan tingkat capaian sasaran tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 102,21%, dan tercapai 196,9% dari target akhir sasaran Renstra di tahun 2026, digambarkan dengan infografis sebagai berikut :

Gambar 2.2
Realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan Tahun 2023
(Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dispangtan)



Gambar 2.3
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra
(Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dispangtan)



Nilai evaluasi reformasi birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian merupakan hasil evaluasi yang dihasilkan dari penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas Pangan dan Pertanian yang dinilai dari unsur : organisasi, tatalaksana, perundang-undangan, SDM, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Capaian nilai evaluasi reformasi birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian pada tahun 2024 bisa terlaksana dengan baik dengan capaian kinerja 102,21% dari capaian tahun 2023 dengan nilai sebesar 77,0 dan capaian di tahun 2024 sebesar 78,74. Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2026 sudah tercapai 196,85%.

Tingkat capain sasaran strategis ke 2 (dua) indikator ke 1 (satu) yaitu **Nilai PPH Ketersediaan**, mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 100,14%, dari target akhir sasaran Renstra di Tahun 2026 sudah tercapai 196,9%. Capaian indikator ke 2 (dua) yaitu **Skor PPH Ketersediaan**, mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 104,13%, dari target akhir sasaran renstra di tahun 2026 sudah

tercapai 137,2%. Capaian PPH Ketersediaan bisa digambarkan dengan infografis sebagai berikut :

Gambar 2.4
Realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan Tahun 2023
(Nilai PPH Ketersediaan)



Gambar 2.5
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra
(Nilai PPH Ketersediaan)



Nilai PPH ketersediaan adalah angka yang menggambarkan jumlah dan komposisi ketersediaan pangan di suatu wilayah. Nilai ini diperoleh dari perkalian persentase angka kecukupan energi. PPH atau Pola Pangan Harapan adalah metode untuk menilai ketersediaan pangan di wilayah tertentu. PPH dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Tingkat ketersediaan pangan selain dilihat berdasarkan kecukupan gizinya, baik energi dan protein, juga dinilai dari keragaman berdasarkan pola pangan harapan (PPH). PPH ketersediaan dihitung berdasarkan ketersediaan energi. Tingkat keragaman dan ketersediaan pangan akan mendukung pencapaian keragaman konsumsi pangan sehingga

dapat dicapai sasaran konsumsi pangan yang diharapkan. Capaian Nilai PPH Ketersediaan Kota Cimahi pada tahun 2024 tercapai dengan baik dari tahun sebelumnya dengan capaian kinerja 100,14% dari capaian tahun 2023 sebesar 2.183 nilai dan terealisasi sebesar 2.186 nilai.

Tingkat capain sasaran strategis ke 2 (dua) indikator ke 2 (dua) yaitu **Skor PPH Ketersediaan**, untuk capaian tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 104,13% dan dari target akhir sasaran Renstra di Tahun 2026 sudah tercapai 196,9%. Capaian indikator ke 2 (dua) yaitu **Skor PPH Ketersediaan**, mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 104,13%, dari target akhir sasaran renstra di tahun 2026 sudah tercapai 137,2%. Capaian PPH Ketersediaan bisa digambarkan dengan infografis sebagai berikut :

Gambar 2.6
Realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan Tahun 2023
(Skor PPH Ketersediaan)



Gambar 2.7
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra (Skor PPH Ketersediaan)



Skor PPH ketersediaan merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Capaian skor PPH Ketersediaan Kota Cimahi pada tahun 2024 tercapai dengan baik dengan capaian kinerja 104,13% dari target skor sebesar 89,6 bisa terealisasi sebesar 93,3.

Tingkat capain sasaran strategis ke 2 (dua) indikator ke 3 (tiga) yaitu **Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian** dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar - 0,23% dengan capaian 85,1%, dan dari target akhir sasaran renstra di tahun 2026 sudah tercapai 99,2%.

Gambar 2.8
Realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan Tahun 2023
(Persentase Nilai PDRB Sektor Pertanian)



Gambar 2.9
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra
(Persentase Nilai PDRB Sektor Pertanian)



Nilai PDRB sektor pertanian adalah nilai tambah bruto dari seluruh kegiatan produksi pertanian dalam suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Komponen PDRB sektor pertanian: Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Jasa pertanian dan perburuan. PDRB sektor pertanian dihitung dengan menjumlahkan nilai output bersih yang tercipta di wilayah domestik dalam periode waktu tertentu. Komoditas dihitung pada harga berlaku. Capaian persentase nilai PDRB sektor pertanian pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya turun sebesar 17,2% dengan capaian kinerja 85,1% dari capaian tahun 2023 sebesar 1,55 dan capaian tahun 2024 sebesar 1,32 skor.

Tingkat capaian sasaran strategis ke 3 yang di ukur dari indikator **Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan** jika dibandingkan dengan tingkat capaian sasaran tahun 2023 juga tercapai juga di tahun 2024 sebesar 100%, dan tercapai juga dari target akhir sasaran Renstra di tahun 2026.

Gambar 2.10
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra
(Persentase Nilai PDRB Sektor Pertanian)



Sampai dengan tahun 2024 Dispangtan telah melaksanakan intervensi rawan pangan untuk masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)/ masyarakat yang tergolong rentan secara sosial ekonomi, yang terkonsentrasi untuk penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kasus stunting di Kota Cimahi. Bantuan berupa beras fortifikasi, susu dan telur yang diberikan untuk ibu hamil dan menyusui dan bayi dibawah 2 tahun (baduta).

Capaian Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan pada tahun 2024 bisa terlaksana dengan baik dengan capaian kinerja 100% dari target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan dukungan dari capaian indikator Program yang telah dilaksanakan. Adapun matrikulasi realisasi capaian Program, target dan realisasi kinerjanya Dispangtan Tahun 2023-2024 sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Pencapaian Target dan Realisasi Program Dispangtan
2023-2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET Tahun Ke-		REALISASI Tahun ke-		Rasio Capaian Tahun ke-	
		1	2	1	2	1	2
Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi energi dan protein	Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari) dan Protein perkapita (gram/kap/hari)	E.2.350 P. 67,9	E.2.350 P. 67,9	E. 2.183 P. 68,2	E. 2.186 P. 75,7	92,8 100,4	93 111,5
	Konsumsi energi perkapita (kkal/kap/hari) dan protein perkapita (gram/kap/hari)	E. 2.350 P. 67,9	E. 2.095 P. 62,5	E. 1993.4 P. 61,3	E. 1.994 P. 60,7	94,9 107,5	95,2 97,1
Berkurangnya wilayah rentan rawan pangan	Prosentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani bagi masyarakat miskin (persen)	100	100	100	100	100	100
Terkendalinya Mutu dan Keamanan Pangan	Prosentase Pangan segar yang aman dikonsumsi (persen)	70	70	98	98	140	140
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi ikan konsumsi (ton)	280	290	289,30	290,36	103,3	100,12
	Jumlah produksi ikan hias (ekor)	2.350.000	2.375.000	2.464.920	2.479.098	104,89	100,37
Meningkatnya produktivitas pelaku usaha pengolaha perikanan	Persentase peningkatan jumlah ikan yang diolah menjadi produk hasil perikanan (persen)	1	2	1	2	100	100

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET Tahun Ke-		REALISASI Tahun ke-		Rasio Capaian Tahun ke-	
		1	2	1	2	1	2
meningkatnya luas lahan pertanian berkelanjutan milik pemerintah	Persentase prasarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan (persentase dokumen persiapan)	30	30	30	30	100	100
Terkendalinya wilayah dari penyakit zoonosis	Prosentase Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kelurahan yang dilayani)	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya pelaku usaha pertanian yang berizin	Persentase izin usaha pertanian yang dilayani (persen)	100	100	100	140	100	140
Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan Petani	Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	6	6	11,76	15	196	250
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (nilai)	BB	BB	BB	BB	100	100
	Nilai IKM Perangkat Daerah	81,05	81,5	81,07	82,4	100,1	101,1
	Indeks Profesionalitas ASN	45	68,5	68,5	80		116,8

Sebagian capaian indikator program merupakan indikator kinerja kunci Dispangtan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah alat ukur utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Adapun matrikulasi realisasi capaian IKK Dispangtan, target dan realisasi kinerja IKK urusan Pangan, Kelautan dan Perikanan dan urusan Pertanian di tahun 2023-2024 sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Pencapaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dispangtan
2023-2024

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS/ PERHITUNGAN	REALISASI Tahun ke-		REALISASI Tahun ke-	
					1		2	
					ELEMEN DATA	CAPAIAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN
1	Pangan	2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan beras Kota	33,96	17,87	50.26	96,65%
				Jumlah kebutuhan cadangan pangan beras Kot	190,01		52	
2	Kelautan dan Perikanan	3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kota (sumber data: one data KKP	289	100,87	290,40	100,14
				Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan	286,5		290	
3	Pertanian	3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	890	6,59 Ton/Ha	1.194,6	6,6 Ton/Ha
				Luas Panen	135		181	
		3.c.2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian /kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya	25-1	2,4%	71-25	184%
				Jumlah kejadian /kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	1		25	
4	Perdagangan	3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi	34,82	32,24%	51,15	43,35%
				RDKK	108		118	

Tabel 2.8
T.C.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dispangtan
2023-2024

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke- 1 (2023)		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-2 (2024)		Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	1	2	1	2	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	13.228.060.618	18.838.991.085	12.343.118.827	17.631.560.227	93,31	93,59	42	43

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang sektor pangan, perikanan dan peternakan di Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Tantangan :

- Kota Cimahi menghadapi kendala serius karena semakin menyusutnya luas lahan pertanian, yang membatasi produksi pangan lokal;
- Petani mengeluhkan terbatasnya akses air untuk irigasi di beberapa area, yang sangat memengaruhi produktivitas;
- Banyak petani mengaku tidak bisa mengakses pupuk subsidi;
- Usia petani yang mayoritas tua dan kurangnya generasi muda dalam bidang pertanian;
- Pembudidaya ikan sering menghadapi kesulitan modal awal, biaya operasional tinggi dan ketergantungan pada pakan mahal;
- Perubahan iklim, degradasi air, dan pencemaran lingkungan membahayakan keberlanjutan sistem budidaya perikanan;
- Pembudidaya perikanan belum menguasai teknik budidaya terkini dan teknologi efisien, sehingga produktivitas terhambat;
- Kurangnya keterampilan pemasaran, branding, dan distribusi membuat produk sulit menembus pasar lebih luas;
- Klinik hewan di Cimahi lebih fokus melayani hewan kesayangan, sehingga peternak kesulitan mendapatkan layanan untuk ternak lokal;
- Meski ada inovasi layanan pengobatan panggilan (PETERPAN) untuk mengatasi kendala akses, efektivitas dan cakupannya masih perlu diperluas;
- Keterbatasan infrastruktur untuk menunjang distribusi, perawatan, dan pemasaran produk peternakan.

2. Peluang

- Kondisi lahan yang sempit bisa jadi peluang untuk mengembangkan *vertical farming*, *hidroponik*, *aquaponik*, dan *pertanian organik* di pekarangan, rumah, atau lahan-lahan

terbatas;

- Kebutuhan sayur, buah, dan bahan pangan pokok di Cimahi terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, sehingga peluang pasar sangat besar;
- Tren *urban farming* sedang digemari anak muda sebagai gaya hidup sehat sekaligus usaha produktif;
- Pemanfaatan IoT (Internet of Things), *smart farming*, dan *greenhouse* sederhana bisa meningkatkan produktivitas meskipun lahan terbatas;
- Sistem terpadu ikan + sayuran (aquaponik) sangat cocok untuk wilayah perkotaan dengan lahan sempit;
- Ikan lele, nila dan gurame memiliki pasar yang stabil di Cimahi dan sekitarnya (Bandung Raya);
- Lokasi Cimahi yang strategis memudahkan distribusi produk perikanan ke pasar tradisional, restoran, hingga katering.
- Ada peluang industri kecil menengah (IKM) berbasis olahan ikan (abon, bakso, nugget ikan) untuk menambah nilai jual;
- Permintaan ayam, telur, susu, dan daging terus tumbuh seiring meningkatnya jumlah penduduk dan gaya hidup sehat;
- Limbah peternakan (kotoran sapi/ayam) bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik atau biogas, mendukung *circular economy*.
- Peningkatan budidaya skala rumah tangga, beternak ayam kampung, puyuh, kelinci, dan domba bisa dibudidayakan dalam skala kecil menengah di kawasan perkotaan;
- Olahan daging dan susu (yoghurt, keju lokal, abon, nugget) punya pasar luas, terutama di Cimahi yang dekat dengan Bandung sebagai pusat kuliner;
- Peluang bagi Dispangtan untuk meningkatkan pelayanan Kesmavet untuk masyarakat sekaligus meningkatkan sumber PAD di sektor pertanian melalui peningkatan sarana dan prasarana UPTD Puskesmas.

Adapun capaian ***per urusan*** yang diampu oleh Dinas Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut :

1. **Urusan Pangan**

1.1. **Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan.**

Ketersediaan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan suatu wilayah. Konsumsi pangan dan gizi mulai dari tingkat masyarakat, rumah tangga, hingga individu secara berkelanjutan membutuhkan penyediaan pangan yang cukup. Menurut Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI tahun 2018 tingkat ketersediaan pangan per kapita bagi setiap penduduk dalam suatu wilayah diukur dari Angka Kecukupan Energi dan Protein. Pada tingkat penyediaan energi ditetapkan sebesar 2.400 kkal/kapita/hari, sedangkan untuk protein sebesar 63 gram/kapita/hari.

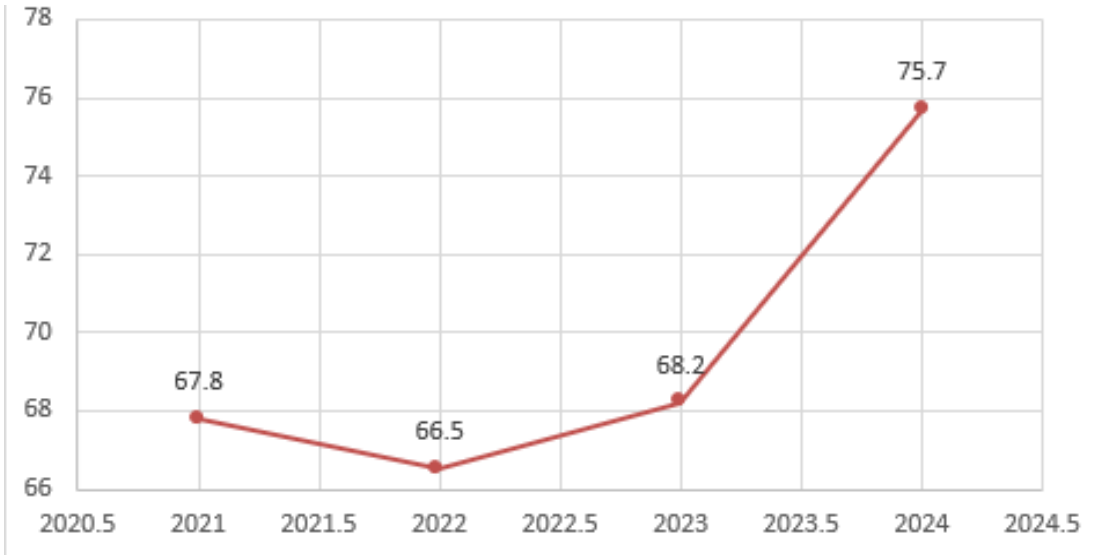
Hasil analisis ketersediaan pangan menggunakan instrumen Neraca Bahan Makanan (NBM) disajikan pada Diagram 2.9 Ketersediaan energi total diKota Cimahi adalah sebesar 2.186 kkal/kapita/hari, Angka ini masih dibawah standar yang ditetapkan untuk mencapai 100% AKE. Persentase ketersediaan energi di Kota Cimahi terhadap standar AKE telah mencapai 91,1%. Angka ini telah melebihi dari Standar minimum kecukupan energi Nasional yakni sebesar 80 persen, namun Masih terdapat gap 8,09% untuk mencapai %AKE ketersediaan sempurna, seperti yang tersaji pada Tabel berikut

Gambar 2.11
Perkembangan Ketersediaan Energi Total (KKal/Kapita/Hari)
Kota Cimahi Tahun 2021-2024



Gambar 2.10 menunjukkan bahwa Hasil kajian NBM Kota Cimahi juga menampilkan Total penyediaan protein di Kota Cimahi adalah 75,7 gram/kapita/hari. Angka ketersediaan protein tersebut telah mencukupi standar yaitu 63 gram/kapita/hari, atau mencapai sekitar 120,15 % dari standar yang ditetapkan.

Gambar. 2.12
Perkembangan Ketersediaan Protein Kota Cimahi Tahun 2021-2024
(Gram/Kap/Hari)



Tabel 2.9 meunjukkan Ketersediaan energi total di Kota Cimahi tahun 2024 adalah 2.186 kkal/kapita/hari, yang terdiri atas pangan nabati (1.910 kkal/kapita/hari) dan pangan hewani 276 kkal/kapita/hari). Ketersediaan energi dan protein di Kota Cimahi tahun 2024 sebagian besar berasal dari pangan sumber nabati. Hal ini sejalan dengan jumlah penyediaan bahan makanan nabati yang lebih besar jika dibandingkan dengan penyediaan bahan makanan hewani. Situasi ketersediaan setiap kelompok pangan di Kota Cimahi cenderung belum merata. Beberapa kelompok bahan makanan terjadi surplus/berlebih, namun ada juga yang masih defisit/kurang. Ketersediaan pangan yang surplus adalah kelompok padi-padian, lemak dan minyak, serta sayur dan buah. Sedangkan, kelompok pangan yang tersedia lebih rendah dari jumlah idealnya adalah umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, serta gula.

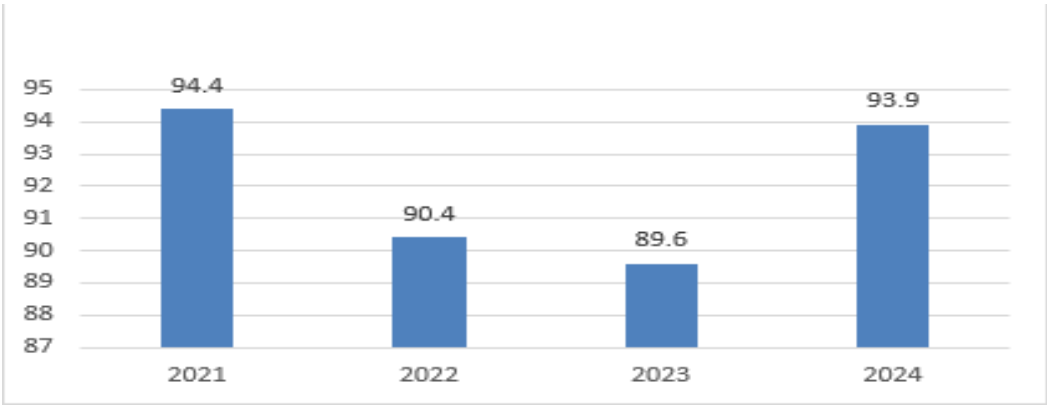
1.2. Situasi ketersediaan Pangan Kota Cimahi Tahun 2024.

Tabel. 2.10
Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan
Kota Cimahi Tahun 2024

Kelompok Pangan	Berat	Energi				Protein		Skor PPH	
	g/kap/hari	kkal/kap/hari		%AKE		g/kap/hari	%AKP		
	Aktual	Ideal	Aktual	Ideal	Aktual	Aktual	Aktual	Ideal	Aktual
Padi-padian	343	1.200	1.204	50,0	50,2	30,3	48	25,0	25,0
Umbi-umbian	37,8	144	38	6,0	1,6	0,4	0,6	2,5	0,8
Pangan Hewani	291,2	288	276	12,0	11,5	26	41,2	24,0	23,0
Minyak dan Lemak	32,5	240	292	10,0	12,2	0,0	0,0	5,0	5,0
Buah/Biji Berminyak	0,8	72	2	3,0	0,1	0,0	0,0	1,0	0,0
Kacang-kacangan	27,5	120	105	5,0	4,4	10,8	17,1	10,0	8,7
Gula	17,8	120	65	5,0	2,7	0,1	0,2	2,5	1,4
Sayur dan Buah	584,4	144	205	6,0	8,6	8,2	13	30,0	30,0
Lain-lain	-	72	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total		2.400	2.186	100,0	91,1	75,7	120,2	100,0	93,9

Tingkat ketersediaan pangan wilayah juga dinilai dari segi kualitas yaitu keberagaman ketersediaan gizi berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH). PPH tingkat ketersediaan dihitung berdasarkan ketersediaan energi Neraca Bahan Makanan (NBM). Skor maksimal dari PPH adalah 100, yang berarti pangan yang tersedia di suatu wilayah telah beragam dari 9 kelompok pangan yang ada. Berdasarkan analisis situasi ketersediaan pangan diketahui bahwa skor PPH Ketersediaan di Kota Cimahi tahun 2024 adalah sebesar 93,9 Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (Gambar 2.11)

Gambar. 2.13
Skor PPH Ketersediaan Kota Cimahi Tahun 2021-2024



1.3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Selain ketersediaan pangan, Pemerintah Kota Cimahi juga wajib meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal di Kota Cimahi. Penganekaragaman konsumsi pangan diukur melalui pencapaian nilai PPH Konsumsi, Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Situasi Konsumsi Pangan rata-rata penduduk Kota Cimahi Tahun 2024 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel. 2.9
Situasi Konsumsi Pangan Rata-rata di Kota Cimahi Tahun 2024

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Energi (Kkal/kap/hr)	% AKE*)	Protein (g/kap/hr)	% AKP*)	Skor PPH
1	Padi-padian	271,5	1.097	52,2	24,6	43,1	25
2	Umbi-umbian	33,6	34	1,6	0,4	0,7	0,8
3	Pangan Hewani	123,9	285	13,5	23,3	40,8	24
4	Minyak dan Lemak	29,4	262	12,5	0,1	0,1	5
5	Buah/Biji Berminyak	0,8	5	0,2	0,1	0,2	0,1
6	Kacang-kacangan	25,8	78	3,7	7,3	12,8	7,4
7	Gula	14,9	59	2,8	0,2	0,4	1,4
8	Sayur dan Buah	202,2	111	5,3	3,6	6,3	26,4
9	Lain-lain	81,6	63	3,0	1,2	2,2	
	Total		1.994	94,9	60,7	106,5	90,1

Sumber : Susenas BPS Provinsi Jawa Barat, diolah Dispangtan Cimahi (2023)

*Angka Kecukuapan Energi (AKE) : 2,100 kkal/kap/hari

** Angka Kecukuapan Protein (AKP) : 57 g/kap/hari

Konsumsi Energi dan Protein penduduk Kota Cimahi yaitu 1.994 kkkal/kapita/hari (94,9%AKE) dan 60,7 g/kapita/hari. Konsumsi energi dan protein ini tergolong normal karena pada rentang -110%. Namun, konsumsi energi kelompok padi-padian sebesar 1097 kkkal/kapita/hari (52,2 % AKE). Penduduk Kota Cimahi harus meningkatkan konsumsi pada semua kelompok pangan.

Konsumsi energi kelompok padi-padian sebesar 1097 kkkal/kapita/hari (52,7%). Jumlah ini tergolong berlebih dari standar yaitu 1,050 kkkal/kapita/hari. (50% AKE). Kelompok pangan padi-padian, terutama beras dan terigu karena sudah berlebih. Disisi lain, konsumsi pangan sumber karbohidrat lainnya yaitu umbi-umbian tergolong rendah, yaitu 33,6 kkkal/kapita/hari dari standar 126 kkkal/kapita/hari.

1.4. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan PPH Konsumsi Kota Cimahi.

Tabel. 2.11
Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan dan Skor Pola Pangan Konsumsi Kota Cimahi Tahun 2018-2024

Indikator	Skor Ideal	2018	2020	2021	2022	2023	2024
PPh Ketersediaan	100	93,4	-	94,4	90,4	89,6	93,9
PPh Konsumsi	100	79,1	84,4	83,3	83,2	90,4	90,1

Berdasarkan data tersebut Kota Cimahi pada tahun 2024 mengalami penurunan PPh konsumsi jika dibandingkan data tahun 2023, Terjadi tren Penurunan Skor PPH diatas 0,1 poin Ini diperkirakan dipengaruhi oleh berkurangnya permintaan terhadap produk bahan pokok, deflasi mata uang, penurunan daya beli dan Perubahan Demografi penduduk (usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Domisili), serta Akses terhadap 9 bahan pokok.

Sampai dengan tahun 2024, cadangan pangan Kota Cimahi hampir mencapai target ideal sesuai dengan ketentuan Bapanas nomor 15 Tahun 2023 bahwa Kota Cimahi untuk Tahun 2024 harus memenuhi kuota CPPD beras minimal sebanyak 52 Ton. Sampai dengan desember 2024 tersedia sebanyak **50,26 ton 96,65% dari cadangan pangan ideal yang ditargetkan**, cadangan pangan tersedia untuk dapat didistribusikan kepada masyarakat apabila terjadi keadaan darurat yang mempengaruhi ketersediaan pangan. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi krisis pangan, tetapi juga untuk mencegah terjadinya inflasi harga pangan yang dapat memberatkan masyarakat, terutama kelompok masyarakat rentan.

2. Urusan Pertanian, Kelautan dan Perikanan

2.1. Sektor Pertanian

Sektor Pertanian di Kota Cimahi memang bukan merupakan sektor unggulan untuk masalah perekonomian di Kota Cimahi. Sektor **pertanian di Kota Cimahi yang merupakan daerah perkotaan** lebih cenderung memiliki peran dalam mewujudkan ketahanan pangan

masyarakat, di tengah tantangan urbanisasi yang semakin pesat. Dalam beberapa tahun terakhir, pertanian di area perkotaan semakin mendapatkan perhatian, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan pangan dan lingkungan yang dihadapi kota-kota besar.

Peran utama sektor pertanian perkotaan dalam mendukung pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan adalah:

1. Meningkatkan Ketahanan Pangan Perkotaan

Sektor pertanian perkotaan memiliki peran yang sangat penting dalam **menjamin ketahanan pangan** bagi penduduk kota. Dengan terbatasnya lahan pertanian di daerah perkotaan, pertanian urban, seperti **pertanian vertikal**, **pertanian hidroponik**, atau **akuaponik**, dapat menyediakan pasokan pangan lokal yang lebih dekat dengan konsumen. Hal ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar kota, tetapi juga mengurangi dampak inflasi pangan yang dipengaruhi oleh harga bahan pangan impor.

2. Penyediaan Lapangan Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat

Pertanian perkotaan membuka berbagai peluang kerja, terutama bagi penduduk yang tinggal di kota dengan keterbatasan akses ke lahan pertanian tradisional. Melalui program-program pertanian kota, seperti **urban farming**, **pertanian hidroponik**, dan **komunitas taman kota**, masyarakat perkotaan dapat terlibat dalam produksi pangan lokal dan memperoleh pendapatan tambahan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui **pelatihan keterampilan** dalam bertani, baik untuk pemula maupun yang berpengalaman. Pelatihan ini mencakup teknik bertani yang lebih ramah lingkungan dan efisien, yang dapat diterapkan di lahan sempit perkotaan dan pekarangan rumah.

3. Pengurangan Jejak Karbon dan Dampak Lingkungan

Pertanian perkotaan juga dapat **menggunakan metode pertanian ramah lingkungan**, seperti pertanian organik, yang menghindari penggunaan bahan kimia berbahaya, serta penerapan sistem pertanian yang menghemat air, seperti **hidroponik**. Praktik-praktik ini mendukung keberlanjutan lingkungan kota dan

membantu mengurangi polusi yang berasal dari sektor pertanian dan industri.

4. Penyuluhan dan Pendidikan Pangan Sehat

Pertanian perkotaan juga dapat menjadi sarana untuk **meningkatkan kesadaran** masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan sehat dan bergizi. Melalui program-program edukasi dan penyuluhan, masyarakat kota dapat lebih memahami cara mengolah makanan yang lebih sehat dengan menggunakan bahan pangan lokal yang segar.

5. Diversifikasi Pangan Lokal dan Peningkatan Kualitas Pangan

Pertanian perkotaan mendukung **diversifikasi pangan lokal** dengan menanam berbagai jenis tanaman yang mungkin tidak ditemukan dalam pasokan pangan komersial. Misalnya, menanam sayuran organik, buah-buahan, rempah-rempah, atau bahkan tanaman obat-obatan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat kota.

6. Mendukung Perekonomian Lokal dan Industri Kreatif

Sektor pertanian perkotaan berperan dalam **menumbuhkan ekonomi lokal**, baik melalui penjualan produk pertanian langsung kepada konsumen, maupun melalui pengembangan industri kreatif berbasis pertanian. Banyak usaha kecil dan menengah (UKM) di kota-kota besar yang berfokus pada pengolahan produk pertanian perkotaan, seperti produk makanan olahan. Dispangtan memfasilitasi penjualan produk-produk pertanian oleh petani lokal melalui program **Gerakan Pangan Murah (GPM)** yang rutin dilaksanakan Dispangtan sepanjang tahun.

Berdasarkan data BPS Kota Cimahi (2025), total luas lahan sawah di Kota Cimahi mengalami penurunan yang semula di tahun 2023 seluas 136,09 ha menjadi 136,05 ha di tahun 2024. yakni mengalami penurunan luasan lahan pada sawah irigasi setengah teknis sebesar 0,04 ha sebagaimana dijelaskan dalam tabel 2.1 berikut ini :

Tabel. 2.12
Luas Lahan Sawah dan Luas Lahan Kering Dirinci Menurut Jenis Pengairan
di Kota Cimahi Tahun 2018-2024

Tahun	Luas Lahan Sawah (Ha)		Total (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)			
	Irigasi Setengah Teknis	Tadah Hujan		Pekarangan/Lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya	Tegal/ Kebun/ Ladang/ Huma	Kolam Tebat	Lainnya
2018	119	17	136	n/a	184	5	2
2019	119	17	136	-	184	-	-
2020	119	17	136	-	189	-	-
2021	119	17	136	-	189	-	-
2022	121,98	13	134,98	-	186,48	-	-
2023	118,09	18	136,09	-	177,3	-	-
2024	118,05	18	136,05	-	179,05	4,2	-

Sumber BPS Cimahi, 2025

Terbatasnya lahan di Kota Cimahi berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas hasil pertanian, sehingga intensifikasi pertanian dengan teknologi yang tepat guna sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian , untuk lahan terbatas di perkotaan maka *Urban farming* dapat menjadi salah satu solusi untuk tetap mempertahankan produksi hasil pertanian di Kota Cimahi, selain itu pengelolaan lahan pertanian, penggunaan pupuk, dan bibit tanaman unggul juga berpengaruh terhadap indeks pertanaman (IP) pada lahan padi yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas padi di Kota Cimahi.

Berdasarkan data pada Tabel 2.10, Luasan panen dan produksi padi di Kota Cimahi mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya, untuk luas panen, produktivitas padi, dan produksi padi cenderung mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2024, terbatasnya lahan pertanian yang tersedia dan juga dampak musim kemarau yang menyebabkan kekeringan pada lahan sawah menjadi salah satu penyebab menurunnya produksi padi di kota Cimahi.

Tabel. 2.13
Luas Lahan Sawah dan Luas Lahan Kering Dirinci Menurut Jenis Pengairan
di Kota Cimahi Tahun 2018-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Panen (ha)	219	168	183	76,61	70,93
Produktivitas (kw/ha)	68	69	66	67	61,38
Produksi (kw/ha)	14892	11596	12064	4404,8	4352,09

Sumber Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, diolah.

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Cimahi Tahun (BPS,2025) dijelaskan bahwa Sektor pertanian di Kota Cimahi tidak memiliki kontribusi yang besar terhadap PDRB Kota Cimahi , namun pada tahun 2025 kontribusi sektor Pertanian mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) persen yaitu yang semula 18 persen di tahun 2022 menjadi 19 persen di tahun 2023, Laju pertumbuhan sektor pertanian di Kota Cimahi juga mengalami peningkatan sebesar 4,55%, yakni yang semula -2,9 persen di tahun 2022 menjadi 1,55 persen di tahun 2023. seperti yang dijelaskan pada Tabel 2.3

Tabel. 2.14
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHB
Kota Cimahi Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan (%)	0,21	0,20	0,18	0,19	0,20
Nilai PDRB ADHB sektor pertanian (Pangan, Pertanian, Peternakan) (miliar rupiah)	67,38	66,97	69,22	76,57	85,99
Nilai Laju Pertumbuhan PDRB sector pertanian (Pangan, Pertanian, Peternakan)	3,18	1,34	-2,90	1,55	3,80

Sumber BPS Cimahi, 2025

2.2. Sektor Peternakan

Pada sub-sektor peternakan, unggas merupakan ternak yang paling banyak dibudidayakan di Kota Cimahi, beberapa komoditi unggas yang dibudidayakan diKota Cimahi diantaranya adalah ayam

buras, ayam pedaging, ayam petelur dan itik.

Tabel. 2.15
Produksi Ternak Unggas di Kota Cimahi Tahun 2020-2024

Jenis Unggas	Jumlah Produksi (Ekor)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ayam Buras	-	14,712	14.000	15.108	11.545	10.545
Ayam Ras Pedaging	37,694	37,758	37.000	297.004	555.450	50285
Ayam Petelur	-	630	209	587	NA	NA
Itik	2.515	2.464	2.000	2.553	1.295	1250

Sumber Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, diolah.

Berdasarkan data Dispangtan pada Tabel 2.13 terdapat penurunan produksi ternak unggas dari tahun 2023 ke tahun 2024. Data Tabel 2.14 menunjukkan bahwa ternak domba dan kambing adalah salah satu komoditas ternak ruminansia terbanyak di kota Cimahi. Selain ternak domba dan kambing, Kota Cimahi juga memiliki ternak sapi potong, dan sapi perah. Berdasarkan Data Tabel 2.14 menunjukkan bahwa pada tahun 2024 jumlah ternak sapi potong dan sapi perah mengalami penurunan , sedangkan produksidomba dan kambing mengalami sedikit peningkatan,

Tabel. 2.16
Jumlah dan Jenis Komoditas Ternak Ruminansia di Kota Cimahi Tahun

Jenis Ternak	Jumlah (ekor)					Tahun 2024
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
Sapi Potong	210	342	300	310	206	226
Kerbau	6	5	3	3		NA
Domba	3,183	2,873	2,900	1,815	2520	2550
Kambing	108	90	80	80		32
Sapi Perah	358	552	558	566	777	648

Sumber : Dispangtan, 2025

Tabel 2.16. menjelaskan bahwa hasil produksi peternakan (daging) dan produksi susu di Kota Cimahi pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023, jumlah populasi ternak sapi potong dan sapi perah yang menurun di 2024

diduga menjadi penyebab menurunnya produksi daging dan susu di Kota Cimahi. Upaya intensifikasi produksi hasil ternak sapi perlu diupayakan di kota Cimahi mengingat terbatasnya populasi ternak sapi luas lahan di kota Cimahi.

Tabel. 2.17
Produksi Hasil Peternakan di Kota Cimahi 2020 - 2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Hasil Peternakan (Daging) (Ton)	357,78	1500,56	416,998	540	540,097
Produksi Hasil Peternakan (Susu) (Liter)	1.336.871	1.351.403	1,370,778	1,881,792	1,569,371

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, diolah.

Seksi Peternakan di Dispangtan memainkan peran yang sangat penting dalam mengelola sektor peternakan di Kota Cimahi, untuk mendukung ketahanan pangan, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta menjaga keberlanjutan ekosistem. Sebagai bagian dari Dinas Pangan dan Pertanian, seksi ini memiliki tanggung jawab dalam merancang, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan serta program yang berhubungan dengan peternakan dan kesehatan hewan. Seksi peternakan juga berkolaborasi dengan UPTD. Pusat Kesehatan Hewan yang selain berkontribusi sebagai salah satu penyumbang PAD juga bekerja sama dengan seksi peternakan dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan kesehatan hewan, pencegahan penyakit, peningkatan kualitas produksi ternak, dan pemberdayaan peternak.

Gambar. 2.14
Target dan Realisasi Capaian Retribusi PAD Puskesmas
2023 -2024



Sumber Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, diolah.

Pendapatan UPT Puskesmas Kota Cimahi menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tidak terlepas dari semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan hewan, baik hewan ternak maupun hewan kesayangan. Kualitas layanan yang profesional, cepat, dan terjangkau telah meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga jumlah kunjungan dan pemanfaatan berbagai jenis pelayanan kesehatan hewan semakin bertambah.

Peningkatan pendapatan juga didorong oleh diversifikasi layanan, mulai dari pemeriksaan kesehatan, vaksinasi dan pengobatan. Perkembangan tren pemeliharaan hewan kesayangan yang terus tumbuh turut menjadi faktor pendorong meningkatnya permintaan layanan klinik hewan di Puskesmas.

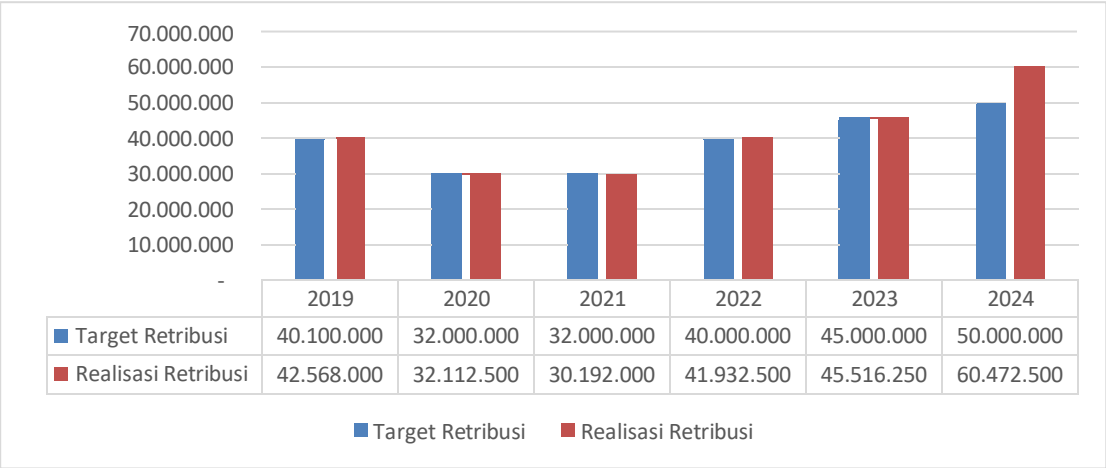
Kinerja positif ini menjadi indikator keberhasilan UPT Puskesmas dalam memberikan layanan publik yang berkualitas sekaligus berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan dukungan yang berkelanjutan, UPT Puskesmas diharapkan mampu menjaga bahkan mempercepat pertumbuhan pendapatannya sebagai langkah strategis menuju penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

2.3 Sektor Perikanan

Budidaya perikanan merupakan salah satu sektor potensial yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Program dan kebijakan yang mendukung pengembangan budidaya perikanan dapat menciptakan peluang ekonomi, pemenuhan gizi masyarkat, memperbaiki kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kemiskinan.

Potensi sektor perikanan di Kota Cimahi terdapat di wilayah utara yakni Kelurahan Citeureup dan Cibabat. Keberadaan BBIAT (Balai Benih Ikan Air Tawar) di kelurahan Cibabat menjadi salah satu rantai nilai dalam produksi dan distribusi benih ikan konsumsi dan ikan hias bagi para pelaku usaha /kelompok budidaya ikan di Kota Cimahi. Keberadaan BBIAT sebagai penyedia benih ikan konsumsi dan ikan hias, juga berfungsi sebagai salah satu sumber Penghasil PAD di sektor perikanan, pada akhir tahun 2024 realisasi PAD BBIAT telah melampaui dari target yang ditentukan,yakni dari taret Rp.50.000.000,00 telah tercapai retribusi sebesar Rp. 60.472.500,00 hal ini menunjukkan bahwa keberadaan BBIAT perlu didukung terus dengan melengkapi sarana dan prasarananya untuk menghasilkan produksi benih ikan konsumsi dan ikan hias yang lebih optimal agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

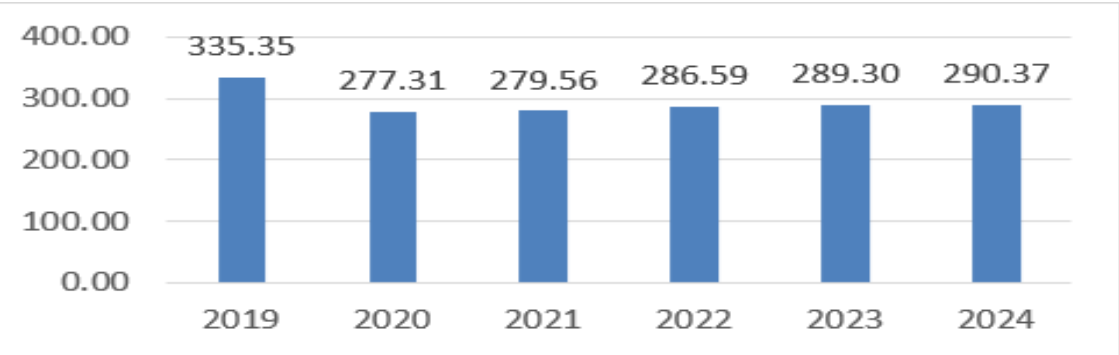
Gambar. 2.15
Realisasi dan Target Pencapaian Retribusi BBIAT
Kota Cimahi Tahun 2020-2024



Sumber Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, diolah.

Terdapat beberapa jenis ikan konsumsi yang dikembangkan di Kota Cimahi,yakni,ikan lele, nila dan ikan mas. Berdasarkan Tabel 2.12 produksi ikan konsumsi pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,37 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi ikan konsumsi pada tahun 2024 mencapai 290,37 ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 5,695,667,800 (Dispangtan,2025).

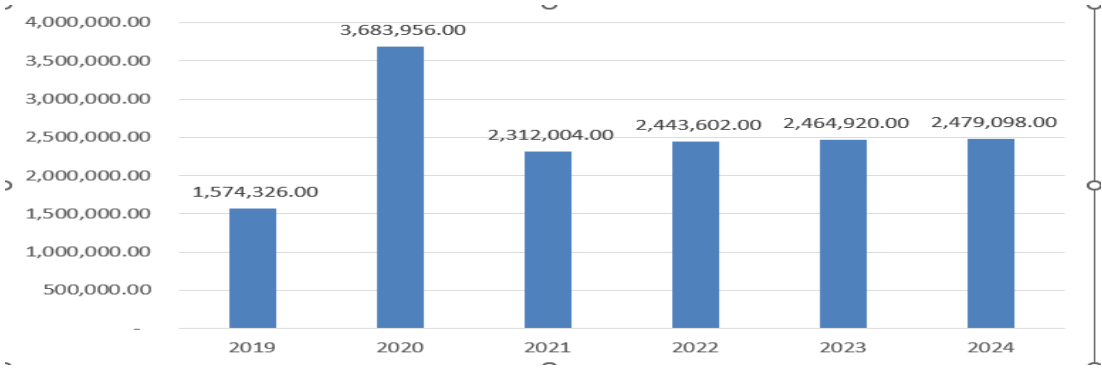
Gambar. 2.16
Produksi Ikan Konsumsi di Kota Cimahi Tahun 2020-2024 (Ton)



Sumber Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, diolah.

Selain budidaya ikan konsumsi di Kota Cimahi (uga terdapat) yang besar dan tidak harus menggunakan lahan luas yaitu pengembangan ikan hias. Dengan karakteristik wilayah perkotaan dan sangat dekat dengan Ibukota Provinsi maka target pasar ikan hias masih sangat terbuka.

Gambar. 2.17
Produksi Ikan Hias yang dikembangkan di Kota Cimahi
Tahun 2020-2024 (ekor)



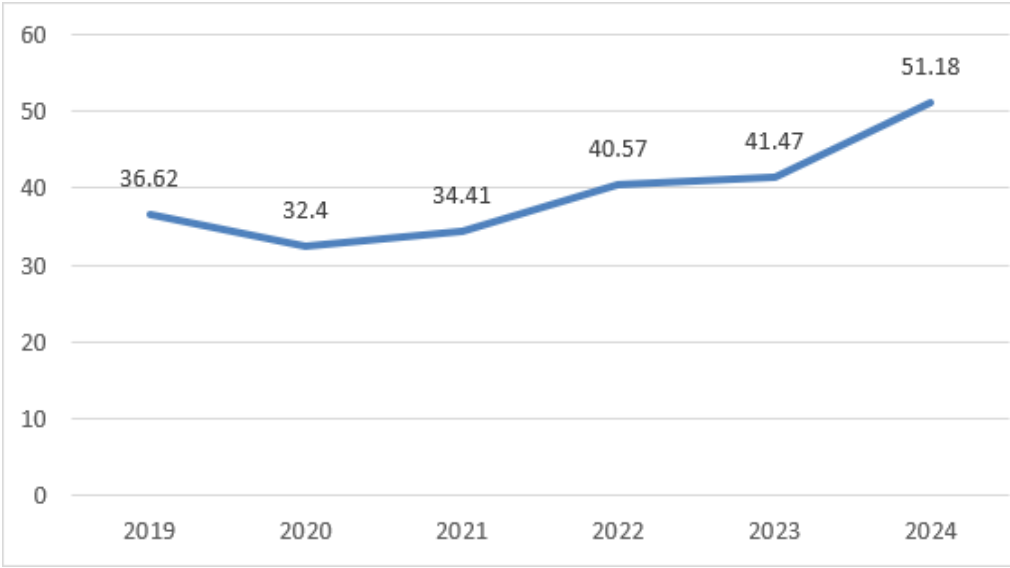
Berdasarkan data pada diagram 2.13 Produksi ikan hias di Kota Cimahi mengalami fluktuatif, pada tahun 2024 produksi ikan hias

mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,58 persen jika dibandingkan dengan produksi ikan hias tahun 2023. Produksi ikan hias pada tahun 2024 mencapai 2.479.098 ekor dengan nilai produksi mencapai Rp.4.277.839.900,00. Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa pelaku usaha ikan konsumsi di Kota Cimahi sudah mulai beralih ke usaha produksi ikan hias, karena usaha budidaya ikan hias dianggap memiliki nilai tambah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan budidaya ikan konsumsi.

2.4 Tingkat Konsumsi Ikan di Kota Cimahi

Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang dapat menjadi alternatif di tengah permasalahan yang dihadapi dalam produksi daging. Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat di Kota Cimahi mengalami fluktuatif, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Tingkat konsumsi ikan pada tahun 2024 mencapai 51,18 Kg/Kap/Tahun Adapun data Tingkat Konsumsi Ikan oleh masyarakat di Kota Cimahi pada tahun 2019-2024 disajikan pada gambar berikut :

Gambar. 2.15
Angka Konsumsi Ikan Kota Cimahi
Tahun 2020-2024 (AKI)



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jabar, 2025

Strategi peningkatan minat masyarakat dalam mengonsumsi ikan diarahkan pada upaya peningkatan kesadaran akan manfaat gizi ikan, kemudahan akses, serta diversifikasi produk olahan ikan.

Edukasi gizi menjadi langkah utama melalui kampanye “Gemar Makan Ikan” yang dikemas secara menarik di sekolah, komunitas, dan media massa. Selain itu, dilakukan sosialisasi mengenai kandungan protein, omega-3, dan zat gizi lain dalam ikan yang sangat penting untuk pertumbuhan anak, kesehatan ibu hamil, dan pencegahan penyakit degeneratif.

Dari sisi ketersediaan, strategi difokuskan pada peningkatan distribusi ikan segar maupun olahan ke pasar tradisional, pasar modern, dan pusat kuliner, sehingga harga tetap terjangkau dan kualitas terjamin. Pemerintah bersama pelaku usaha juga mendorong inovasi produk olahan ikan yang lebih variatif, praktis, dan sesuai selera masyarakat, terutama generasi muda, seperti nugget ikan, bakso ikan, abon, hingga makanan cepat saji berbasis ikan.

Dengan strategi ini diharapkan masyarakat semakin menyadari pentingnya mengonsumsi ikan secara rutin, sehingga tingkat konsumsi ikan nasional meningkat dan berdampak positif terhadap kualitas gizi, kesehatan masyarakat, serta ketahanan pangan.

2.4.1 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, perangkat daerah dituntut untuk senantiasa bersinergi, baik secara internal maupun eksternal. Sinergi internal dilakukan melalui koordinasi antarbidang/unit kerja di dalam perangkat daerah agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih terintegrasi, efisien, serta saling mendukung. Sedangkan sinergi eksternal diwujudkan melalui kerja sama dengan perangkat daerah lain, pemerintah pusat, lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.

Dengan adanya sinergi tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan tidak berjalan secara parsial, melainkan saling melengkapi untuk mendukung pencapaian indikator kinerja perangkat daerah. Hal ini sekaligus menjadi landasan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik, memperkuat ketahanan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis perangkat

daerah dapat dicapai secara optimal dan berkelanjutan.

Penetapan kelompok sasaran ini dimaksudkan agar program dan kegiatan perangkat daerah dapat lebih terarah, tepat sasaran, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kelompok sasaran layanan Dinas Pangan dan Pertanian meliputi:

1. **Petani, peternak dan pembudidaya ikan**, sebagai pelaku utama produksi pangan dan pertanian;
2. **Pelaku usaha pangan dan pertanian**, termasuk UMKM, koperasi, serta pelaku rantai pasok pangan;
3. **Masyarakat umum**, sebagai konsumen yang berhak memperoleh akses pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau;
4. **Kelompok rentan**, Masyarakat rentan rawan pangan, balita, ibu hamil/menyusui yang membutuhkan jaminan ketahanan pangan dan gizi;
5. **Lembaga pendidikan dan kelompok masyarakat**, sebagai mitra dalam pengembangan sumber daya manusia, penelitian, serta penyuluhan pertanian dan pangan;
6. **Aparatur pemerintah daerah bidang pangan dan pertanian**, melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi teknis untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan pertanian.

Dengan penetapan kelompok sasaran ini, Dinas Pangan dan Pertanian diharapkan mampu menyelenggarakan program dan kegiatan yang tepat guna, berdaya saing, serta berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani, dan pembangunan pertanian berkelanjutan di Kota Cimahi.

2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu Strategis

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pangan dan pertanian, masih dijumpai sejumlah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Permasalahan utama antara lain masih

terbatasnya akses petani, peternak, dan pelaku usaha kecil terhadap sarana produksi, permodalan, serta teknologi tepat guna; rendahnya kualitas dan kontinuitas pasokan pangan; lemahnya sistem distribusi dan cadangan pangan; serta belum optimalnya penyuluhan dan pendampingan bagi petani dan kelompok tani. Selain itu, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan daya saing produk pertanian lokal, menjaga stabilitas harga, dan memastikan ketersediaan pangan yang aman, bergizi, serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Dalam penyusunan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025-2029, isu strategis dirumuskan dengan memperhatikan isu KLHS RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025-2029 dan isu lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Selain itu, isu strategis dirumuskan berdasarkan potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

Permasalahan tersebut melahirkan sejumlah isu strategis yang perlu ditangani secara terpadu. Isu strategis tersebut mencakup:

Tabel 2.18
Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pangan dan Pertanian

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS KLHS	ISU DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS DISPANGTAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Status daya dukung pangan yang belum melampaui ambang batas adalah seluas 42%	Masih rendahnya tingkat ketersediaan dan konsumsi pangan	1. Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan (ibu dan anak) serta masih kurangnya upaya perilaku hidup sehat masyarakat	Perubahan iklim	Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan	Perubahan peran Jakarta sebagai kota global	Tingkat ketersediaan dan pemanfaatan pangan
						Ketahanan dan keamanan pangan
						Stabilisasi harga bahan pangan
Kualitas hidup masyarakat Kota Cimahi dapat dikatakan	Belum optimalnya daya saing sumber	1. Belum optimalnya akses dan kualitas	3. Demografi global (Kesehatan)	2. Bonus demografi Indonesia 4. Konektivitas	6. peningkatan kualitas layanan	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS KLHS	ISU DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS DISPANGTAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
lebih baik dibandingkan dengan nilai capaian IPM provinsi Jawa Barat karena berada di atas nilai capaian Provinsi Jawa Barat	daya manusia	pelayanan kesehatan (ibu dan anak) serta masih kurangnya upaya perilaku hidup sehat masyarakat		dan infrastruktur dasar	publik	
		2. Belum optimalnya akses pelayanan pendidikan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat	daya saing sumber daya manusia	2. Bonus demografi Indonesia 4. Konektivitas dan infrastruktur dasar		
Selama 5 (lima) tahun terakhir struktur perekonomian Kota Cimahi di dalam PDRB ADHB ditopang oleh sektor sekunder yang memiliki peran sebesar 75% dengan kontribusi utama dari sektor Industri pengolahan sebesar lebih dari 40%, sedangkan sektor primer hanya berkontribusi sebesar 0,18% dan sektor tersier sebesar 24,12%.	Masih kurangnya pengembangan sektor unggulan ekonomi daerah	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja melalui ekonomi kreatif dan digital serta pariwisata	Geopolitik dan geo ekonomi		Kemajuan teknologi informasi	Peningkatan produktivitas dan diversifikasi komoditas
						Peningkatan kapasitas dan kelembagaan petani
						Optimalisasi lahan terbatas dan urban farming
						Pengelolaan input pertanian yang efisien
						Adaptasi terhadap perubahan iklim dan lingkungan
Nilai Indeks reformasi Birokrasi Kota Cimahi pada tahun 2019-2023 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan Indeks	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan		Demografi global (Catatan Sipil)	Desentralisasi dan otonomi daerah	Peningkatan kualitas layanan publik	Optimalisasi tata kelola Dispangtan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASA LAHAN	ISU STRATEGIS KLHS	ISU DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS DISPANGTAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Reformasi Birokrasi Kota Cimahi mencapai angka 81,26 dengan kategori A-						

Dari tabel permasalahan dan isu strategis Kota Cimahi terdapat beberapa permasalahan yang diampu oleh Dispangtan, yaitu :

1. Masih rendahnya tingkat ketersediaan dan konsumsi pangan;
2. Masih kurangnya pengembangan sektor sektor unggulan ekonomi daerah (sektor pangan, pertanian dan perikanan);
3. Belum optimalnya tata kelola Dispangtan.

Sektor pangan, pertanian, dan perikanan di Kota Cimahi masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Dari permasalahan-permasalahan yang ada, berikut beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas Dispangtan yaitu :

1. Masih rendahnya tingkat ketersediaan dan konsumsi pangan, Faktor Penghambat,

1. Produksi pangan belum optimal
 - Lahan pertanian semakin terbatas akibat alih fungsi lahan.
 - Produktivitas tanaman/ternak/ikan masih rendah karena keterbatasan teknologi, benih/bibit unggul, dan sarana produksi.
2. Distribusi dan rantai pasokan belum lancar
 - Sistem logistik pangan belum efisien, biaya transportasi tinggi.
 - Infrastruktur penyimpanan (gudang, cold storage) terbatas, sehingga terjadi kerugian pascapanen.
3. Daya beli masyarakat masih rendah
 - Tingkat pendapatan sebagian masyarakat belum cukup untuk mengakses pangan bergizi seimbang.
 - Ketergantungan pada pangan murah (beras, mie instan) menyebabkan diversifikasi pangan terhambat.

4. Perilaku konsumsi yang belum beragam

- Pola konsumsi masyarakat masih didominasi beras, sedangkan konsumsi sumber protein hewani, sayur, dan buah rendah.
- Kesadaran gizi dan pengetahuan tentang pola makan sehat masih terbatas.

5. Faktor kebijakan dan koordinasi

- Program ketahanan pangan belum sepenuhnya terintegrasi antar-sektor.

Faktor Pendorong :

1. Ketersediaan sumber daya lokal

- Lahan pertanian, perikanan, dan peternakan masih ada meskipun terbatas.
- Kekayaan biodiversitas pangan lokal (umbi-umbian, jagung, sagu, sayuran, ikan, unggas) bisa dioptimalkan.

2. Dukungan kebijakan pemerintah

- Adanya Inpres, Inmen, maupun regulasi daerah tentang ketahanan pangan.
- Program bantuan sarana produksi, subsidi pupuk, dan penguatan kelembagaan petani/nelayan

3. Peran lembaga dan masyarakat

- Kelembagaan pangan (Gapoktan, Pokdakan, kelompok ternak) yang bisa digerakkan untuk meningkatkan produksi.
- Peran PKK, kader posyandu, sekolah, dan komunitas dalam edukasi gizi dan konsumsi pangan beragam.

4. Perkembangan teknologi

- Inovasi budidaya pertanian modern (urban farming, hidroponik, bioflok perikanan, pakan alternatif).
- Teknologi pascapanen dan pengolahan pangan yang semakin terjangkau.

5. Kesadaran Masyarakat yang Mulai Tumbuh

- Tren hidup sehat membuat masyarakat mulai terbuka pada konsumsi pangan sehat, bergizi, dan beragam.

2. Masih kurangnya pengembangan sektor-sektor unggulan ekonomi daerah (urusan pangan, pertanian dan perikanan),

Faktor Penghambat :

- Rendahnya akses terhadap teknologi modern,
- Lemahnya dukungan infrastruktur produksi dan distribusi
- Belum optimalnya kerjasama antar pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat.
- Keterbatasan modal dan kualitas SDM
- Belum meratanya promosi serta pengembangan pasar juga menghambat percepatan pertumbuhan sektor unggulan tersebut.

Faktor pendorong :

1. Dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah
 - Adanya Inpres/Inmen, Perda, maupun RPJMD yang memprioritaskan pembangunan pertanian dan perikanan.
 - Program nasional maupun daerah yang mendorong ketahanan pangan, hilirisasi, dan ekspor produk hasil pertanian/perikanan.
2. Sumber daya manusia dan kelembagaan
 - Tersedianya kelompok tani, nelayan, dan pembudidaya ikan yang siap diberdayakan.
 - Dukungan dari penyuluh pertanian dan perikanan, serta adanya lembaga pendidikan dan pelatihan di daerah.
3. Perkembangan teknologi dan inovasi
 - Teknologi budidaya modern (smart farming, bioflok, sistem intensif) semakin terjangkau.
 - Inovasi pengolahan hasil pertanian dan perikanan membuka peluang peningkatan nilai tambah.
4. Peluang pasar yang luas
 - Tingginya permintaan pangan sehat, organik, dan produk lokal khas daerah.

3. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan,

Faktor Penghambat :

- Lemahnya koordinasi lintas perangkat daerah;
- Keterbatasan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi, serta rendahnya konsistensi dalam penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik;

- Kapasitas sumber daya aparatur, keterbatasan regulasi yang adaptif, serta belum efektifnya mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja.

Faktor pendukung :

- Komitmen pimpinan daerah dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik;
- Dukungan regulasi yang semakin adaptif;
- Berkembangnya teknologi informasi dalam pelayanan publik
- Partisipasi masyarakat yang semakin tinggi menjadi faktor pendorong untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan responsif.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kota Cimahi Tahun 2025-2029.

Dalam perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah, selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang kemudian diselaraskan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, juga dilakukan penelaahan agar selaras dengan kebijakan nasional.

Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian disusun sebagai pedoman dalam mewujudkan pembangunan sektor pangan dan pertanian yang berkelanjutan, berdaya saing, serta mampu menjamin ketahanan pangan daerah. Sektor pangan dan pertanian memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas harga, serta mendukung perekonomian daerah.

Melalui Renstra, Dinas Pangan dan Pertanian berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam, meningkatkan kualitas SDM pertanian, memperkuat sistem distribusi dan cadangan pangan, serta mendorong inovasi dan teknologi tepat guna. Dengan demikian, diharapkan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi secara cukup, aman, bermutu, beragam, dan terjangkau.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Cimahi dirumuskan untuk memberikan arah yang jelas terhadap program dan kegiatan pembangunan selama 5 tahun, sehingga terjaga kesinambungan antara kebijakan jangka menengah dengan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025–2029

yang merupakan dokumen perencanaan resmi hasil penetapan kepala daerah terpilih pasca Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah Kota Cimahi Tahun 2025–2029, yang telah dirumuskan secara sistematis dalam RPJMD, serta dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang terukur. Penyusunan tujuan dan sasaran juga mempertimbangkan arah kebijakan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dan RKP Tahun 2025, serta diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 untuk memastikan integrasi vertikal perencanaan antar-tingkatan pemerintahan.

3.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Dalam rangka mengarahkan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, Pemerintah menetapkan Asta Cita sebagai delapan agenda prioritas pembangunan nasional yang menjadi visi dan arah kebijakan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029. Asta Cita tidak hanya merupakan janji politik, tetapi telah dirumuskan secara teknokratis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dan dijadikan dasar penyusunan delapan Prioritas Nasional yang menjadi kerangka utama pembangunan nasional lima tahunan.

Asta Cita mencerminkan komitmen Pemerintah untuk menghadirkan negara dalam seluruh aspek kehidupan rakyat dengan menekankan pada transformasi struktural, keadilan sosial, dan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan. Agenda ini mencakup bidang ideologi, ekonomi, sosial, hukum, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan.

Adapun kedelapan Asta Cita yang menjadi landasan arah pembangunan nasional adalah:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam konteks perencanaan pembangunan nasional, Asta Cita tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi secara menyeluruh dengan sasaran pembangunan nasional yang terukur dan berbasis hasil (*outcome-based development*). Sasaran pembangunan nasional Tahun 2025–2029 disusun sebagai representasi keberhasilan pembangunan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan transformasi menuju *Indonesia Maju* dan mendekati status negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Sasaran ini terstruktur dalam beberapa dimensi strategis yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan pengaruh global. Secara garis besar, sasaran

pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029 mencakup hal-hal berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan per Kapita Menuju Setara Negara Maju
Sasaran ini mencerminkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Target utama meliputi:
 - 1) Pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dari 5,05% pada tahun 2024 menjadi 5,3% pada 2025, dan diproyeksikan mencapai 8% pada tahun 2029;
 - 2) Kenaikan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita dari USD 4.870 (2023) menjadi USD 5.410 (2025), hingga mencapai USD 8.000 (2029);
 - 3) Peningkatan kontribusi sektor-sektor strategis, yaitu PDB Maritim dari 7,9% (2022) menjadi 8,1% (2025) dan 9,1% (2029), serta PDB Manufaktur dari 18,67% (2023) menjadi 21,9% pada 2029.
2. Kepemimpinan dan Pengaruh Indonesia di Dunia Internasional Meningkat
Indonesia menargetkan peningkatan posisi dalam kancah global melalui penguatan diplomasi dan kapasitas nasional. Hal ini tercermin dari peningkatan peringkat Global Power Index, dari posisi 34 (2023) menjadi 33 (2025), dan 29 (2029), yang mencerminkan pengakuan atas peran strategis Indonesia dalam geopolitik internasional.
3. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang
Penurunan kemiskinan menjadi prioritas utama pembangunan. Targetnya adalah:
 - 1) Menurunkan tingkat kemiskinan dari 9,03% (Maret 2024) menjadi 7–8% (2025), dan 4,5–5,0% (2029);
 - 2) Penghapusan kemiskinan ekstrem hingga kurang dari 0,5% pada 2026;
 - 3) Penurunan rasio gini dari 0,379 (Maret 2024) menjadi 0,378–0,382 (2025) dan 0,372–0,375 (2029);
 - 4) Peningkatan kontribusi sektor KTI (Knowledge and Technology Intensive) dalam PDRB dari 20,9% (2023) menjadi 22,4% (2029).

4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat
- Peningkatan kualitas SDM menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang. Target yang ditetapkan adalah peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) dari 0,54 (2020) menjadi 0,56 (2025), dan 0,59 (2029), yang mencerminkan peningkatan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, serta produktivitas tenaga kerja.
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission
- Pembangunan rendah karbon dan pelestarian lingkungan menjadi pilar penting. Sasaran utama adalah:
- 1) Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari 34,09% (2022) menjadi 35,53% (2025) dan 45,17% (2029);
 - 2) Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dari 72,54 (2023) menjadi 76,49 (2025) dan 77,20 (2029).

Sasaran-sasaran tersebut menjadi pedoman utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJMD dan RKPD, untuk memastikan kesinambungan dan sinergi antara kebijakan nasional dan daerah. Sasaran ini juga menjadi dasar pengukuran keberhasilan pembangunan lintas sektor secara berkelanjutan.

Kedelapan Asta Cita memberikan arah normatif dan ideologis, sementara sasaran pembangunan nasional yang menyertainya memberikan ukuran teknokratis yang wajib dijadikan rujukan oleh pemerintah daerah dalam menyusun Perubahan RKPD.

Berikut adalah tabel keselarasan antara Asta Cita dengan Misi Kota Cimahi Tahun 2025-2029:

Tabel 3.1
Keselarasan antara Asta Cita dengan
Misi Kota Cimahi Tahun 2025-2029

Asta Cita (Prioritas Nasional)	Uraian Prioritas	Misi Kota Cimahi	Kesesuaian Substansi
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM	Penguatan demokrasi, toleransi, dan kehidupan berbangsa	Misi 5: Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat	Membangun masyarakat inklusif, harmonis, dan partisipatif

Asta Cita (Prioritas Nasional)	Uraian Prioritas	Misi Kota Cimahi	Kesesuaian Substansi
		melalui kolaborasi antar generasi	
-2. Memantapkan pertahanan keamanan dan mendorong kemandirian bangsa	Ketahanan pangan, energi, ekonomi syariah, digital, hijau, dan biru	Misi 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang produktif	Penguatan ekonomi lokal dan kemandirian daerah berbasis potensi unggulan
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	Konektivitas wilayah, wirausaha, industri kreatif dan digital	Misi 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang produktif Misi 4: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kondusifitas kota yang aman, nyaman dan berkelanjutan	Mendukung infrastruktur produktif dan lapangan kerja inovatif
4. Memperkuat pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing	Pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, kepemudaan	Misi 1: Mewujudkan Kota Cimahi yang maju dengan sumber daya manusia yang unggul, agamis dan berkarakter	Penekanan pada kualitas manusia dan pembentukan karakter warga
5. Melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri SDA	Hilirisasi tambang, pertanian, kelautan, dan industri strategis	Misi 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang produktif	Mendorong nilai tambah ekonomi dan daya saing lokal
6. Membangun dari desa dan dari bawah	Penguatan desa, pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi	Misi 5: Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi antar	Pendekatan berbasis komunitas dan keadilan sosial

Asta Cita (Prioritas Nasional)	Uraian Prioritas	Misi Kota Cimahi	Kesesuaian Substansi
		generasi	
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi	Reformasi kelembagaan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi	Misi 3: Menjadikan Cimahi sebagai kota teladan dalam tata kelola pemerintahan	Reformasi birokrasi, pelayanan digital, dan transparansi
8. Memperkuat harmoni sosial, lingkungan, budaya, dan toleransi	Perubahan iklim, pelestarian budaya, dan keberlanjutan	Misi 4: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kondusifitas kota yang aman, nyaman dan berkelanjutan	Penataan lingkungan dan budaya lokal yang adaptif dan ramah iklim

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kota Cimahi, 2025

3.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan arah pembangunan jangka menengah 2025–2029 melalui visi “**Jawa Barat Istimewa: Lembur Diurus, Kota Ditata.**” Visi ini mencerminkan tekad untuk memperkuat peran wilayah perdesaan (lembur) dan perkotaan (kota) secara berimbang, melalui pendekatan pembangunan yang adaptif, berkelanjutan, dan berbasis pada keunggulan lokal.

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat dituangkan secara sistematis dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029. Penelaahan terhadap dokumen tersebut menjadi penting bagi Pemerintah Kota Cimahi dalam menyelaraskan prioritas dan arah kebijakan pembangunan tahun 2025, terutama dalam konteks kawasan strategis Bandung Raya.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Tujuan	Sasaran
Tujuan 1 Terwujudnya SDM yang <i>Cageur, Bageur, Bener, Pinter</i> dan <i>Singer</i>	– Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; – Terbentuknya individu beretika dan berbudaya; – Terbentuknya individu berintegritas dan taat hukum; – Terbentuknya individu berpengetahuan dan berwawasan; – Terbentuknya individu kreatif dan inovatif.
Tujuan 2.1 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Tinggi berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi	– Meningkatkan produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam dan Luar Negeri; – Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan untuk Swasembada Pangan; – Meningkatkan Sektor Perdagangan melalui Optimalisasi Disttibusi Barang dan Jasa; – Meningkatkan Produktivitas Sektor Pariwisata melalui Pengembangan Destinasi Wisata dan Insutri Kreatif.
Tujuan 2.2 Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat, Kesempatan Kerja, Lapangan Berusaha	– Meningkatkan Penciptaan dan Perluasan Lapangan Kerja; – Meningkatkan Kualifikasi, Kompetensi dan Keahlian Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja; – Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan.
Tujuan 3 Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, Sosial, dan Ekonomi yang Berbasis Lingkungan	– Meningkatkan Layanan Infrastruktur Kewilayahan, Infrastruktur Dasar di Pedesaan dan Kawasan Konservasi, serta Penataan Perkotaan yang Berbasis Lingkungan; – Meningkatnya Keterampilan, Akses Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro dan Kecil; – Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat.
Tujuan 4.1 Terciptanya Masyarakat Mandiri dan Adaptif Terhadap Perkembangan Sosial dan	– Meningkatkan Penerapan Iptek, Riset dan Inovasi dalam pembangunan;

Tujuan	Sasaran
Teknologi	– Meningkatnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan kebijakan.
Tujuan 4.2 Terwujudnya Birokrasi Gesit dan Berorientasi Pelayanan	– Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif

Sumber: Dokumen Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat

3.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Cimahi

Pembangunan Kota Cimahi diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi daerah, peningkatan kualitas lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang profesional. Tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan dengan mempertimbangkan visi dan misi Kepala Daerah, isu strategis daerah, serta kebutuhan masyarakat.

Untuk periode RPJMD 2025-2026 Kota Cimahi mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi Kota Cimahi Tahun 2025-2029

**“CIMAHI MANTAP”
MELALUI KOLABORASI ANTAR GENERASI YANG MAJU, UNGGUL
DAN BERKELANJUTAN**

Penjabaran Visi Kota Cimahi Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut :

- MAJU : Mewujudkan Pembangunan Kota Cimahi yang lebih maju di segala bidang
- AGAMIS : Menciptakan kota yang agamis serta menjunjung tinggi nilai religious dan toleran
- NYAMAN: Menuwujudkan lingkungan asri dan berkelanjutan dengan fasilitas ruang ekspresi public yang representatif
- TELADAN: Menjadiklan Cimahi sebagai kota teladan dalam tata Kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berintegritas
- AMAN: Mewujudkan lingkungan masyarakat yang damai, tertib dan teratur

- **PRODUKTIF** : Meningkatkan daya kretivitas masyarakat yang produksti menuju masyarakat sejahtera

Dengan demikian visi “CIMAHI MANTAP” adalah mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul, serta dapat mengambil kesempatan mejadi kota yang unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religious akan berdaya saing untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik

Misi Kota Cimahi Tahun 2025-2029

Untuk mengaktualisasikan visi tersebut, dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

- Mewujudkan Kota Cimahi yang Maju dengan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Agamis, dan Berkarakter,
 - Misi ini diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta karakter dan spiritualitas masyarakat, yang menjadi fondasi daya saing daerah.
- Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Produktif,
 - Fokus pada pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan ekonomi lokal, UMKM, sektor kreatif, serta penciptaan peluang kerja yang inklusif.
- Menjadikan Cimahi sebagai Kota Teladan dalam Tata Kelola Pemerintahan,
 - Mengedepankan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, partisipatif, serta berbasis inovasi dan digitalisasi pelayanan publik.
- Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kondusifitas Kota yang Aman, Nyaman, dan Berkelanjutan,
 - Bertujuan untuk menciptakan kota yang layak huni, sehat, dan resilien terhadap perubahan iklim dan bencana.
- Meningkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kolaborasi Antar Generasi.

- Misi ini menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan, serta penguatan solidaritas dan ketahanan sosial.

Visi dan Misi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2025-2029

Untuk periode Renstra Tahun 2025 -2029 Dinas Pangan dan Pertanian mengemban Visi :

“Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Pertanian Perkotaan yang Modern, Mandiri, dan Berkelanjutan”

Penjabaran Visi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2025-2029 diuraikan dengan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan, kemandirian, dan aksesibilitas pangan masyarakat.
2. Mengembangkan pertanian dan perikanan yang produktif, inovatif, serta berorientasi pada pertanian perkotaan.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas layanan publik di bidang pangan, pertanian, dan perikanan.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, perangkat daerah perlu merumuskan permasalahan strategis yang menjadi prioritas penanganan. Permasalahan strategis tersebut muncul dari berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi, baik dari aspek internal maupun eksternal.

Secara umum, perangkat daerah masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia dan sarana prasarana. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya optimal, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi, serta koordinasi lintas sektor yang belum efektif turut menghambat kinerja. Pada sektor pembangunan spesifik, seperti pangan, pertanian, dan perikanan, tantangan yang muncul antara lain keterbatasan lahan, rendahnya produktivitas dan konsumsi pangan bergizi, minimnya inovasi budidaya, serta terbatasnya akses pasar dan

pembiayaan.

Namun, di sisi lain, terdapat faktor pendorong yang dapat dimanfaatkan sebagai modal. Dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, posisi strategis Kota Cimahi di wilayah Bandung Raya, berkembangnya teknologi inovatif seperti urban farming dan aquaponik, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat menjadi peluang untuk memperkuat daya saing daerah.

Dengan memperhatikan faktor penghambat dan pendorong tersebut, permasalahan strategis perangkat daerah perlu dirumuskan secara sistematis agar program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing ekonomi lokal, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan diturunkan dari visi dan misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang merupakan rangkaian kinerja yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Adapun sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025-2029. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Tujuan, dan Sasaran RENSTRA Dispangtan Tahun 2025-2029

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline	TARGET TAHUN						KET
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1. Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 3. Meningkatnya kesejahteraan sosial	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	88,86	88,80	88,9	89	89,1	89,2	89,3	
			Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)	N/A	2,98	2,87	2,74	2,59	2,42	2,18	
		Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan Daerah	Skor PPH Ketersediaan (skor)	89,6	89,6	89,6	89,7	89,7	89,8	89,8	
		Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dispangtan	78,74	79	79,5	80	80,2	80,5	81	
	Meningkatnya kesejahteraan pembudidaya perikanan dan petani		Rasio PDRB sektor pertanian (%)	0,19	0,11	0,106	0,102	0,098	0,094	0,09	
		Meningkatnya Produktivitas dan Diversifikasi Komoditas Pertanian dan perikanan dan meningkatnya Pendapatan dan Kemandirian Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Persentase peningkatan PDRB sektor pertanian (%)	1,32	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	

Pembangunan merupakan proses yang terdiri dari berbagai tahapan yang saling berkesinambungan, dimulai dari perencanaan hingga evaluasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks pembangunan di sektor apapun, baik itu pembangunan infrastruktur, pembangunan sosial, atau pembangunan ekonomi, setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan pembangunan itu sendiri.

Berikut adalah **tahapan pembangunan** periode Renstra Dispangtan Kota Cimahi 2025- 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Penahapan Pembangunan Renstra Dispangtan 2025-2029

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan pondasi dan kebijakan teknis sektor pangan, pertanian dan perikanan	Peningkatan Kapasitas dan Efektivitas Program sektor pangan, pertanian dan perikanan	Akselerasi dan Penguatan Sistem sektor pangan pertanian dan perikanan	Integrasi dan kemandirian sektor pangan, pertanian dan perikanan	Konsolidasi Capaian dan Keberlanjutan sektor pangan, pertanian dan perikanan

Sumber: Dispangtan Cimahi

Tahapan Pembangunan Renstra Dispangtan 2025–2029 bila diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2025 – Pondasi dan Konsolidasi
- Pemetaan potensi, permasalahan, dan kebutuhan sektor pangan, pertanian, dan perikanan.
 - Penguatan kelembagaan perangkat daerah, kelompok tani, dan UPT (Puskeswan, BBIAT).
 - Persiapan regulasi dan tata kelola menuju transformasi BLUD.
2. Tahun 2026 – Peningkatan Kapasitas dan Efektivitas Program
- Peningkatan produktivitas pertanian perkotaan/urban farming pada lahan terbatas.
 - Penguatan cadangan pangan daerah dan intervensi

stabilisasi harga.

- Penerapan teknologi pertanian tepat guna dan ramah lingkungan.
- Peningkatan layanan UPT Puskesmas dan BBIAT.

3. Tahun 2027 – Akselerasi dan Penguatan Sistem

- Diversifikasi pangan lokal berbasis B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman).
- Pengembangan infrastruktur distribusi pangan (storage, pasar tani, rantai dingin).
- Digitalisasi sistem informasi pangan dan harga untuk mendukung pengendalian inflasi.
- Uji coba tata kelola BLUD pada UPT. Puskesmas.

4. Tahun 2028 – Integrasi dan Kemandirian

- Integrasi program pangan dan pertanian dengan sektor lain (ekonomi, lingkungan, kesehatan).
- Kemandirian kelompok tani/wilayah dalam menyediakan pangan lokal.
- Optimalisasi kelembagaan pangan dan pertanian untuk mendukung ekonomi daerah.
- UPT mulai menjalankan pola BLUD dengan layanan mandiri dan berkualitas.

5. Tahun 2029 – Konsolidasi Capaian dan Keberlanjutan

- Evaluasi menyeluruh capaian tujuan dan sasaran Renstra 2025–2029.
- Konsolidasi ketahanan pangan daerah sebagai fondasi RPJMD berikutnya.
- Penguatan keberlanjutan program pertanian perkotaan, cadangan pangan, dan layanan BLUD.
- Penyusunan rekomendasi arah pembangunan pangan dan pertanian 2030–2034.

Arah kebijakan Dispangtan harus sejalan dengan visi dan misi yang dimiliki oleh pemerintah Kota Cimahi. Kebijakan perangkat daerah berfungsi sebagai **penjabaran operasional** dari rencana strategis pemerintah daerah, dengan tujuan agar pembangunan di

daerah dapat berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Dispangtan yang memiliki peran dalam mendukung ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong keberlanjutan sektor pertanian, perikanan dan pangan di daerah. Arah kebijakan perangkat daerah di sektor pangan dan pertanian harus mampu menjawab tantangan yang dihadapi oleh sektor ini.

Tabel 3.6
Perumusan arah kebijakan Renstra Dispangtan 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra DISPANGTAN
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Penguatan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD)
			Peningkatan produksi pangan lokal
			Pengembangan sistem distribusi pangan
			Peningkatan Diversifikasi Pangan
			Peningkatan pengawasan keamanan dan sertifikasi pangan
			Peningkatan penyuluhan pola makan sehat (B2SA)
			Pengembangan sistem logistik pangan
			Peningkatan pemahaman masyarakat terkait pengurangan food waste
			Peningkatan konsumsi ikan masyarakat
2.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Peningkatan kualitas pembangunan ekonomi	Peningkatan pendapatan (PAD) sektor pertanian dan perikanan
			Peningkatan pelayanan perizinan usaha pertanian dan perikanan
3.	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan intervensi rawan pangan
			Peningkatan produksi dan produktivitas melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, perikanan dan peternakan.
			Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan prasarana Pertanian
			Peningkatan kapasitas dan kelembagaan petani
			Peningkatan dan penjaminan kesehatan hewan dan pengendalian wabah penyakit zoonosis
			optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

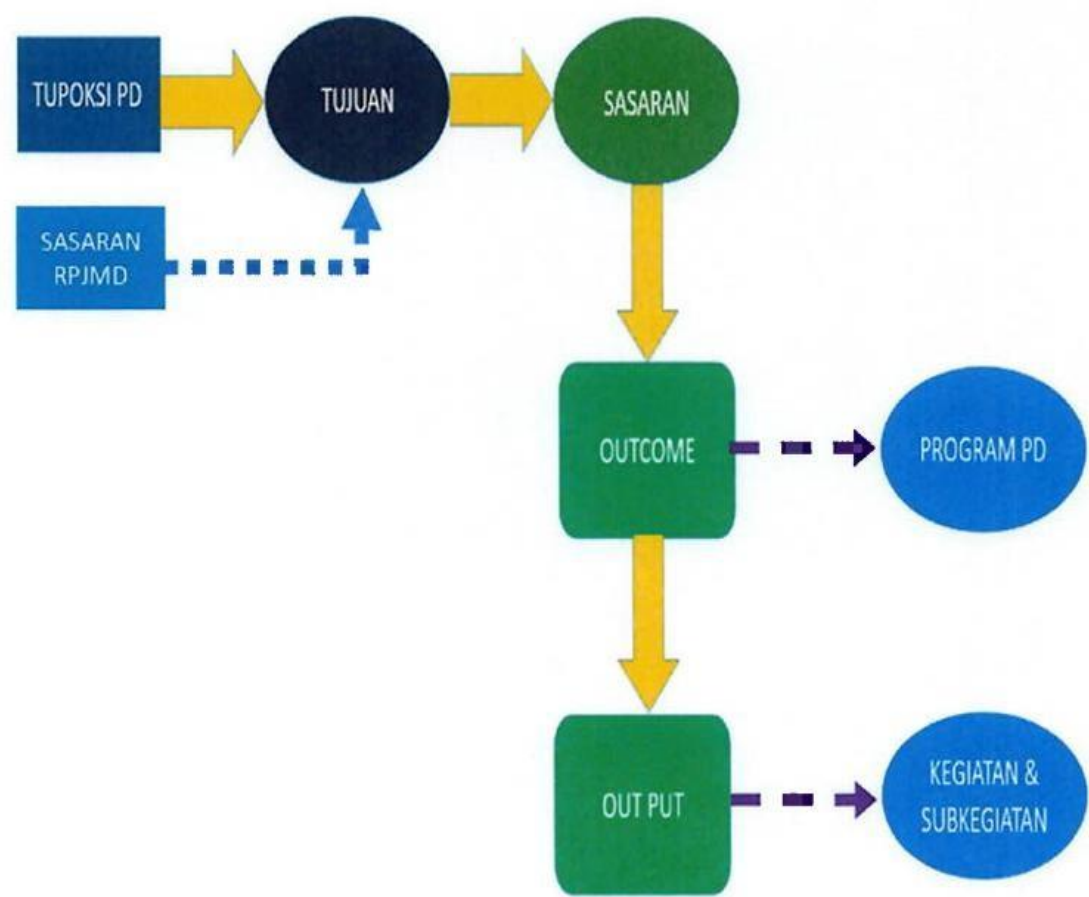
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian dilakukan secara sistematis, terukur, dan selaras dengan visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan daerah. Proses perumusan diawali dengan identifikasi isu strategis, permasalahan utama, serta potensi lokal yang dimiliki dalam bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Selanjutnya, dilakukan analisis kebutuhan serta penetapan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu perencanaan lima tahun.

Dalam penyusunannya, program dan kegiatan disusun untuk menjawab permasalahan pokok seperti peningkatan produksi pangan, ketersediaan dan distribusi pangan, peningkatan daya saing komoditas pertanian, pemberdayaan petani/pembudidaya/peternak, serta penguatan kelembagaan dan SDM pertanian. Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan, dan kegiatan diturunkan lagi ke dalam sub kegiatan yang lebih operasional, dengan indikator kinerja yang jelas, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renstra Dinas Pangan dan Pertanian 2025-2029 dilaksanakan dengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah, serta telah disesuaikan dengan arah kebijakan nasional dan regulasi terbaru, khususnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029.

Gambar 4.1
Kerangka perumusan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra



Adapun rumusan program/kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dispangtan untuk periode 2025 – 2029 bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Kerangka perumusan program/kegiatan/sub kegiatan
Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.09.3.27.3.25.02.0000 - Dinas Pangan dan Pertanian							
- Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi - Meningkatkan kesejahteraan sosial - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau				Indeks Ketahanan Pangan (IKP)		
					Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (POU)		
		Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan Daerah			Skor PPH Ketersediaan (skor)		
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan		Persentase jumlah cadangan pangan (%)	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah total cadangan pangan pemerintah (beras) terhadap jumlah ketersediaan /kebutuhan pangan dalam daerah (Ton)	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	2.09.02.2.01.0006 - Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis CV (Coeficient Varian) Bahan Pangan Pokok	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
				a dalam rangka	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.09.03.2.01.0002 - Penyediaan Pangan	

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	yang Tersedia (Laporan)	Berbasis Sumber Daya Lokal	
					Informasi Stok Pangan (Dokumen)	2.09.03.2.01.0011 - Pemantauan Stok Pangan	
					Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
					Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.03.2.01.0020 - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai angka kecukupan gizi	Persentase pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	2.09.03.2.04.0005 - Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	Berbasis Sumber Daya Lokal	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan		persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan (%)	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
				Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Kota Cimahi	Jumlah pengawasan keamanan pangan ke retail/pasar	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.2.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat		Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
				Tersedianya fasilitas rekomendasi bagi usaha pengolahan perikanan	Persentase pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil	3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Rekomendasi)	3.25.06.2.01.0003 - Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
				Terfasilitasinya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan	Jumlah pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan	

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kesejahteraan petani dan pembudidaya perikanan				Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		
		Meningkatnya Produktivitas dan Diversifikasi Komoditas Pertanian dan perikanan dan meningkatnya Pendapatan dan Kemandirian Unit Pelaksana Teknis (UPT)			Persentase kenaikan PDRB sektor pertanian (%)	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Tersedianya fasilitas rekomendasi bagi usaha pengolahan perikanan	Persentase pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil	3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Rekomendasi)	3.25.06.2.01.0003 - Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
					Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner			3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Terlaksananya pengelolaan pembudidayaan ikan	Jumlah benih ikan konsumsi (ekor)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah produksi ikan hias (ekor)		
					PAD yang dihasilkan (Rupiah)		
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasinya penyediaan dan penyaluran	Persentase pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil	3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan	

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				bahan baku industri pengolahan ikan di Kota Cimahi		Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Produktivitas dan Diversifikasi Komoditas Pertanian dan perikanan dan meningkatnya Pendapatan dan Kemandirian Unit			Persentase kenaikan PDRB sektor pertanian (%)		
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner		Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				terlaksana penjaminan kesehatan hewan	Jumlah Hewan yang divaksinasi Rabies	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan	

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Pelaksana Teknis (UPT)				Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Hewan yang divaksinasi flu burung		
					Jumlah kader zoonosis (Orang)	3.27.04.2.01.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	
					Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Jumlah Hewan Qurban yang Diperiksa	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah sampel produk asal hewan yang diperiksa		
					Jumlah kegiatan peningkatan kesedaran masyarakat terhadap kesmavet		

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
					Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orang)	3.27.04.2.04.0008 - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian		Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (%)	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
				Terfasilitasinya penerbitan izin usaha pertanian di Kota Cimahi	Jumlah rekomendasi kelayakan Usaha Pertanian	3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	3.27.06.2.01.0002 - Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	
					Nilai evaluasi reformasi birokrasi Dispangtan		

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pangan dan Pertanian (Indeks)	2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pangan dan Pertanian (Indeks)		
					Nilai SAKIP Dinas Pangan dan Pertanian (Nilai)		
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya dokumen perencanaan, penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.09.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	2.09.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.09.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.09.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN/P3K	Persentase terfasilitasinya gaji ASN dan P3K Dispangtan	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terfasilitasinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.09.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase terfasilitasinya penunjang administrasi umum perangkat daerah	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan	2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang	

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.09.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.09.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan	Persentase terfasilitasinya	2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa	

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	penunjang urusan pemerintah daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemeliharaan daerah	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.09.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.09.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	2.09.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.09.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.09.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya peningkatan pelayanan BLUD Puskesmas	Persentase terfasilitasinya peningkatan pelayanan BLUD	2.09.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	2.09.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan		Persentase intervensi Daerah Rentan Rawan Pangan (Persentase)	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
				Terlaksananya penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	Cakupan wilayah informasi peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
					Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
				Terlaksananya penanganan kerawanan	Cakupan wilayah penanganan kerawanan pangan	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan	

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				pangan di Kota Cimahi		Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Produktivitas dan Diversifikasi Komoditas Pertanian dan perikanan dan meningkatnya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Terfasilitasinya penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan di Kota Cimahi	Persentase rekomendasi izin usaha bidang Pembudidayaan ikan yang dilayani Tenaga Kerja Asing (Rekomendasi)	3.25.04.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Pendapatan dan Kemandirian Unit Pelaksana Teknis (UPT)			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing (Rekomendasi)	3.25.04.2.01.0001 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	
				Terlaksananya pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Jumlah Pembudidaya ikan yang diberdayakan	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan,	3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi,	

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
				Terlaksananya pengelolaan pembudidayaan ikan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kelestarian Laut dan Keanekaragaman Hayati		Luasan Kawasan Konservasi (Km ²)	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya pengawasan sumber daya perikanan di Kota Cimahi	Persentase pelaku usaha pembudidaya ikan yang diperiksa kepatuhannya	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Persentase Peningkatan Produksi		

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Tanaman Hortikultura (Persentase)		
				Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian	persentase pengawasan pengguna sarana pascapanen tanaman pangan yang dilakukan	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	3.27.02.2.01.0005 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	3.27.02.2.01.0007 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian		Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	3.27.02.2.01.0014 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	
					Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian	Jumlah kawasan Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (kawasan)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)		
					Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0009 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	3.27.03.2.01.0017 - Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	

Tabel 4.3
Rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				14.883.662.012,00		14.990.295.640,00		15.164.406.732,00		15.248.181.239,00		15.734.324.460,00	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.772.482.899,00		12.912.538.870,00		12.972.794.310,00		12.985.213.408,00		13.370.852.476,00	
Meningkatnya kualitas layanan operasional pemerintahan	Persentase terfasilitasinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	12.912.538.870,00	100	12.972.794.310,00	100	12.772.482.899,00	100	12.985.213.408,00	100	13.370.852.476,00	
2.09.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				150.000.000,00		157.500.000,00		165.375.000,00		173.643.750,00		182.325.938,00	
Terlaksananya peningkatan pelayanan BLUD	Persentase terfasilitasinya peningkatan pelayanan BLUD	100	100	150.000.000,00	100	157.500.000,00	100	165.375.000,00	100	173.643.750,00	100	182.325.938,00	
2.09.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				150.000.000,00		157.500.000,00		165.375.000,00		173.643.750,00		182.325.938,00	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	N/A	1	150.000.000,00	1	157.500.000,00	1	165.375.000,00	1	173.643.750,00	1	182.325.938,00	
Meningkatnya kualitas layanan operasional pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pangan dan Pertanian (Indeks)	84,12	84,4	12.912.538.870,00	84,7	12.972.794.310,00	84,95	12.772.482.899,00	85,25	12.985.213.408,00	85,5	13.370.852.476,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pangan dan Pertanian (Indeks)	80	81		82		83		84		84		
	Nilai SAKIP Dinas Pangan dan Pertanian (Nilai)	77,9	78		78,25		78,5		78,75		79		
2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				617.036.590,00		647.888.420,00		680.282.840,00		714.296.983,00		750.011.831,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya dokumen perencanaan, penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah	100	100	617.036.590,00	100	647.888.420,00	100	680.282.840,00	100	714.296.983,00	100	750.011.831,00	
2.09.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				55.888.050,00		58.682.453,00		61.616.575,00		64.697.404,00		67.932.274,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	13	55.888.050,00	13	58.682.453,00	13	61.616.575,00	13	64.697.404,00	13	67.932.274,00	
2.09.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				25.000.000,00		26.250.000,00		27.562.500,00		28.940.625,00		30.387.656,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	6	25.000.000,00	6	26.250.000,00	6	27.562.500,00	6	28.940.625,00	6	30.387.656,00	
2.09.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				528.648.540,00		555.080.967,00		582.835.015,00		611.976.766,00		642.575.604,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	24	528.648.540,00	24	555.080.967,00	24	582.835.015,00	24	611.976.766,00	24	642.575.604,00	
2.09.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				7.500.000,00		7.875.000,00		8.268.750,00		8.682.188,00		9.116.297,00	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	100	100	7.500.000,00	100	7.875.000,00	100	8.268.750,00	100	8.682.188,00	100	9.116.297,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.413.463.610,00		9.315.972.707,00		9.254.603.552,00		9.439.695.623,00		9.628.489.535,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN/P3K	Persentase terfasilitasinya gaji ASN dan P3K Dispangtan	100	100	9.413.463.610,00	100	9.315.972.707,00	100	9.254.603.552,00	100	9.439.695.623,00	100	9.628.489.535,00	
2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.413.463.610,00		9.315.972.707,00		9.254.603.552,00		9.439.695.623,00		9.628.489.535,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	54	68	9.413.463.610,00	67	9.315.972.707,00	68	9.254.603.552,00	69	9.439.695.623,00	70	9.628.489.535,00	
2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				67.000.000,00		70.350.000,00		73.867.500,00		77.560.875,00		81.438.919,00	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terfasilitasinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100	67.000.000,00	100	70.350.000,00	100	73.867.500,00	100	77.560.875,00	100	81.438.919,00	
2.09.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				67.000.000,00		70.350.000,00		73.867.500,00		77.560.875,00		81.438.919,00	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	52	68	67.000.000,00	69	70.350.000,00	70	73.867.500,00	71	77.560.875,00	72	81.438.919,00	
2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				615.575.054,00		634.146.385,00		665.853.704,00		699.146.390,00		734.103.709,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase terfasilitasinya penunjang administrasi umum perangkat daerah	100	100	615.575.054,00	100	634.146.385,00	100	665.853.704,00	100	699.146.390,00	100	734.103.709,00	
2.09.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.500.000,00		9.975.000,00		10.473.750,00		10.997.438,00		11.547.309,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1	9.500.000,00	1	9.975.000,00	1	10.473.750,00	1	10.997.438,00	1	11.547.309,00	
2.09.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				282.543.870,00		296.671.064,00		311.504.617,00		327.079.848,00		343.433.840,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1	282.543.870,00	1	296.671.064,00	1	311.504.617,00	1	327.079.848,00	1	343.433.840,00	
2.09.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.09.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				37.424.000,00		39.295.200,00		41.259.960,00		43.322.958,00		45.489.106,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1	37.424.000,00	1	39.295.200,00	1	41.259.960,00	1	43.322.958,00	1	45.489.106,00	
2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				19.481.068,00		20.455.121,00		21.477.877,00		22.551.771,00		23.679.360,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	1	19.481.068,00	1	20.455.121,00	1	21.477.877,00	1	22.551.771,00	1	23.679.360,00	
2.09.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.09.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.474.000,00		12.500.000,00		13.125.000,00		13.781.250,00		14.470.313,00	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	1	12.474.000,00	1	12.500.000,00	1	13.125.000,00	1	13.781.250,00	1	14.470.313,00	
2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				249.152.116,00		250.000.000,00		262.500.000,00		275.625.000,00		289.406.250,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	1	249.152.116,00	1	250.000.000,00	1	262.500.000,00	1	275.625.000,00	1	289.406.250,00	
2.09.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000,00		5.250.000,00		5.512.500,00		5.788.125,00		6.077.531,00	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.250.000,00	1	5.512.500,00	1	5.788.125,00	1	6.077.531,00	
2.09.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				779.091.960,00		815.546.558,00		853.823.886,00		894.015.080,00		936.215.835,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah	100	100	779.091.960,00	100	815.546.558,00	100	853.823.886,00	100	894.015.080,00	100	936.215.835,00	
2.09.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				175.770.000,00		184.558.500,00		193.786.425,00		203.475.746,00		213.649.534,00	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	1	175.770.000,00	1	184.558.500,00	1	193.786.425,00	1	203.475.746,00	1	213.649.534,00	
2.09.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000,00		157.500.000,00		165.375.000,00		173.643.750,00		182.325.938,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	150.000.000,00	1	157.500.000,00	1	165.375.000,00	1	173.643.750,00	1	182.325.938,00	
2.09.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.09.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.09.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				403.321.960,00		423.488.058,00		444.662.461,00		466.895.584,00		490.240.363,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	403.321.960,00	1	423.488.058,00	1	444.662.461,00	1	466.895.584,00	1	490.240.363,00	
2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				589.924.169,00		619.420.378,00		650.391.397,00		682.910.966,00		717.056.514,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terfasilitasinya penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	589.924.169,00	100	619.420.378,00	100	650.391.397,00	100	682.910.966,00	100	717.056.514,00	
2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				102.273.850,00		107.387.543,00		112.756.920,00		118.394.766,00		124.314.504,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	102.273.850,00	12	107.387.543,00	12	112.756.920,00	12	118.394.766,00	12	124.314.504,00	
2.09.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				158.562.400,00		166.490.520,00		174.815.046,00		183.555.798,00		192.733.588,00	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	158.562.400,00	1	166.490.520,00	1	174.815.046,00	1	183.555.798,00	1	192.733.588,00	
2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				329.087.919,00		345.542.315,00		362.819.431,00		380.960.402,00		400.008.422,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	329.087.919,00	1	345.542.315,00	1	362.819.431,00	1	380.960.402,00	1	400.008.422,00	
2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				680.447.487,00		711.969.862,00		428.285.020,00		303.943.741,00		341.210.195,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemeliharaan daerah	100	100	680.447.487,00	100	711.969.862,00	100	428.285.020,00	100	303.943.741,00	100	341.210.195,00	
2.09.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				180.447.487,00		189.469.862,00		198.943.355,00		208.890.523,00		219.335.049,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	2	180.447.487,00	2	189.469.862,00	2	198.943.355,00	2	208.890.523,00	2	219.335.049,00	
2.09.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.09.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
2.09.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.09.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				450.000.000,00		472.500.000,00		179.341.665,00		45.053.218,00		71.875.146,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	3	3	450.000.000,00	3	472.500.000,00	3	179.341.665,00	3	45.053.218,00	3	71.875.146,00	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				227.740.728,00		192.555.856,00		195.972.501,00		196.689.150,00		207.365.639,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase jumlah cadangan pangan (%)	96,7	100	227.740.728,00	100	192.555.856,00	100	195.972.501,00	100	196.689.150,00	100	207.365.639,00	
2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				227.740.728,00		192.555.856,00		195.972.501,00		196.689.150,00		207.365.639,00	
Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah total cadangan pangan pemerintah (beras) terhadap jumlah ketersediaan /kebutuhan pangan dalam daerah (Ton)	50,26	55	227.740.728,00	57	192.555.856,00	59	195.972.501,00	61	196.689.150,00	63	207.365.639,00	
2.09.02.2.01.0006 - Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				227.740.728,00		192.555.856,00		195.972.501,00		196.689.150,00		207.365.639,00	
Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	N/A	1	227.740.728,00	1	192.555.856,00	1	195.972.501,00	1	196.689.150,00	1	207.365.639,00	
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				550.542.579,00		588.326.781,00		620.002.133,00		634.444.941,00		686.339.309,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	90,1	90,2	550.542.579,00	90,3	588.326.781,00	90,4	620.002.133,00	90,5	634.444.941,00	90,6	686.339.309,00	
2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				365.746.350,00		378.339.554,00		397.256.531,00		417.119.358,00		437.975.326,00	
Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Analisis CV (Coefficient Varian) Bahan Pahan Pokok (dokumen)	12	12	365.746.350,00	12	378.339.554,00	12	397.256.531,00	12	417.119.358,00	12	437.975.326,00	
2.09.03.2.01.0002 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				189.803.800,00		193.599.876,00		203.279.870,00		213.443.863,00		224.116.056,00	
Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	0	4	189.803.800,00	4	193.599.876,00	4	203.279.870,00	4	213.443.863,00	4	224.116.056,00	
2.09.03.2.01.0011 - Pemantauan Stok Pangan				94.442.550,00		99.164.678,00		104.122.911,00		109.329.057,00		114.795.510,00	
Tersedianya Informasi Stok Pangan	Informasi Stok Pangan (Dokumen)	12	12	94.442.550,00	12	99.164.678,00	12	104.122.911,00	12	109.329.057,00	12	114.795.510,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota				58.000.000,00		60.900.000,00		63.945.000,00		67.142.250,00		70.499.363,00	
Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Ko ta (Laporan)	12	12	58.000.000,00	12	60.900.000,00	12	63.945.000,00	12	67.142.250,00	12	70.499.363,00	
2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)				23.500.000,00		24.675.000,00		25.908.750,00		27.204.188,00		28.564.397,00	
Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	1	1	23.500.000,00	1	24.675.000,00	1	25.908.750,00	1	27.204.188,00	1	28.564.397,00	
2.09.03.2.01.0020 - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Ko ta (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				268.698.591,00		172.203.025,00		191.070.250,00		202.882.775,00		248.363.983,00	
Terlaksananya pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai angka kecukupan gizi	Persentase pelaksanaan pencapaian target konsumsi	N/A	100	268.698.591,00	4	172.203.025,00	4	191.070.250,00	4	202.882.775,00	4	248.363.983,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	pangan per kapita/tahun												
2.09.03.2.04.0005 - Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				268.698.591,00		172.203.025,00		191.070.250,00		202.882.775,00		248.363.983,00	
Terlaksananya Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	4	4	268.698.591,00	4	172.203.025,00	4	191.070.250,00	4	202.882.775,00	4	248.363.983,00	
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				1.188.003.083,00		1.234.550.327,00		1.265.201.541,00		1.362.055.862,00		1.376.135.496,00	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase intervensi Daerah Rentan Rawan Pangan (Persentase)	100	100	1.188.003.083,00	100	1.234.550.327,00	100	1.265.201.541,00	100	1.362.055.862,00	100	1.376.135.496,00	
2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				32.500.000,00		34.125.000,00		35.831.250,00		37.622.813,00		39.503.953,00	
Terlaksananya penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	Cakupan wilayah informasi peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	3	3	32.500.000,00	4	34.125.000,00	4	35.831.250,00	4	37.622.813,00	4	39.503.953,00	
2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta				32.500.000,00		34.125.000,00		35.831.250,00		37.622.813,00		39.503.953,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Ketahanan dan Kerentanan Pangan													
Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	32.500.000,00	1	34.125.000,00	1	35.831.250,00	1	37.622.813,00	1	39.503.953,00	
2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				1.343.635.496,00		1.153.878.083,00		1.198.719.077,00		1.227.578.728,00		1.322.551.909,00	
Terlaksananya penanganan kerawanan pangan di Kota Cimahi	Cakupan wilayah penanganan kerawanan pangan	1	1	1.343.635.496,00	1	1.153.878.083,00	1	1.198.719.077,00	1	1.227.578.728,00	1	1.322.551.909,00	
2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.313.635.496,00		1.122.378.083,00		1.165.644.077,00		1.192.849.978,00		1.286.086.721,00	
Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	1.313.635.496,00	1	1.122.378.083,00	1	1.165.644.077,00	1	1.192.849.978,00	1	1.286.086.721,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.750,00		36.465.188,00	
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	1	1	30.000.000,00	1	31.500.000,00	1	33.075.000,00	1	34.728.750,00	1	36.465.188,00	
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				86.399.812,00		92.329.504,00		97.300.500,00		97.321.204,00		107.711.174,00	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan (%)	98	98	86.399.812,00	98	92.329.504,00	98	97.300.500,00	98	97.321.204,00	98	107.711.174,00	
2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				97.321.204,00		86.399.812,00		92.329.504,00		97.300.500,00		107.711.174,00	
Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Kota Cimahi	Jumlah pengawasan keamanan pangan ke retail/pasar	12	12	97.321.204,00	12	86.399.812,00	12	92.329.504,00	12	97.300.500,00	12	107.711.174,00	
2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.09.05.2.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				97.321.204,00		86.399.812,00		92.329.504,00		97.300.500,00		107.711.174,00	
Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1	1	97.321.204,00	1	86.399.812,00	1	92.329.504,00	1	97.300.500,00	1	107.711.174,00	
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				598.706.961,00		639.796.725,00		674.243.205,00		674.386.679,00		746.383.909,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				491.963.547,00		436.755.365,00		466.730.254,00		491.858.883,00		544.485.363,00	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	290,3	290,5	491.963.547,00	290,6	436.755.365,00	290,7	466.730.254,00	290,8	491.858.883,00	290,9	544.485.363,00	
3.25.04.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				14.558.400,00		15.286.320,00		16.050.636,00		16.853.168,00		17.695.826,00	
Terfasilitasinya penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan di Kota Cimahi	Persentase rekomendasi ijin usaha bidang Pembudidaya ikan yang dilayani Tenaga Kerja Asing (Rekomendasi)	N/A	100	14.558.400,00	100	15.286.320,00	100	16.050.636,00	100	16.853.168,00	100	17.695.826,00	
3.25.04.2.01.0001 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing				14.558.400,00		15.286.320,00		16.050.636,00		16.853.168,00		17.695.826,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing (Rekomendasi	N/A	5	14.558.400,00	5	15.286.320,00	5	16.050.636,00	5	16.853.168,00	5	17.695.826,00	
3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				59.160.100,00		62.118.105,00		65.224.010,00		68.485.211,00		71.909.471,00	
Terlaksananya pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Jumlah Pembudidaya ikan yang diberdayakan	15	16	59.160.100,00	17	62.118.105,00	18	65.224.010,00	19	68.485.211,00	20	71.909.471,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				59.160.100,00		62.118.105,00		65.224.010,00		68.485.211,00		71.909.471,00	
Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan , Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggara an Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	8	8	59.160.100,00	8	62.118.105,00	10	65.224.010,00	10	68.485.211,00	10	71.909.471,00	
3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				418.245.047,00		359.350.940,00		385.455.608,00		406.520.504,00		454.880.066,00	
Terlaksananya pengelolaan pembudidayaan ikan	Jumlah benih ikan konsumsi (ekor)	143750	145.000	418.245.047,00	150.000	359.350.940,00	155.000	385.455.608,00	160.000	406.520.504,00	165.000	454.880.066,00	
	Jumlah produksi ikan hias (ekor)	7780	7800		7900		8000		8100		8200		
	PAD yang dihasilkan (Rupiah)	60.472.50 0	60.500.00 0		61.710.00 0		62.920.000		64.130.000		65.340.00 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4.999.750,00		5.249.738,00		5.512.224,00		5.787.836,00		6.077.227,00	
Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaa n Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta (Dokumen)	1	1	4.999.750,00	1	5.249.738,00	1	5.512.224,00	1	5.787.836,00	1	6.077.227,00	
3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				413.245.297,00		354.101.202,00		379.943.384,00		400.732.668,00		448.802.839,00	
Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaa n Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta (unit)	1	1	655.407.905,00	1	581.857.987,00	1	621.791.391,00	1	655.268.469,00	1	725.378.970,00	
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				18.978.774,00		16.848.974,00		18.005.334,00		18.974.736,00		21.004.939,00	
Meningkatnya Kelestarian Laut dan Keanekaragaman Hayati	Luasan Kawasan Konservasi	N/A	1	18.978.774,00	1	16.848.974,00	1	18.005.334,00	1	18.974.736,00	1	21.004.939,00	
3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				18.978.774,00		16.848.974,00		18.005.334,00		18.974.736,00		21.004.939,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya pengawasan sumber daya perikanan di Kota Cimahi	Persentase pelaku usaha pembudidaya ikan yang diperiksa kepatuhannya	N/A	100	18.978.774,00	100	16.848.974,00	100	18.005.334,00	100	18.974.736,00	100	21.004.939,00	
3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				0		0		0		0		0	
Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaa n ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kot a (Pelaku Usaha)			0		0		0		0		0	
3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota				18.978.774,00		16.848.974,00		18.005.334,00		18.974.736,00		21.004.939,00	
Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kot a (Pelaku Usaha)	9	20	18.978.774,00	20	16.848.974,00	20	18.005.334,00	20	18.974.736,00	20	21.004.939,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				163.444.358,00		145.102.622,00		155.061.137,00		163.409.586,00		180.893.607,00	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	51,18	51,2	163.444.358,00	51,2	145.102.622,00	51,3	155.061.137,00	51,3	163.409.586,00	51,4	180.893.607,00	
3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya fasilitas rekomendasi bagi usaha pengolahan perikanan	Persentase pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil	N/A	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
3.25.06.2.01.0003 - Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Rekomendasi)	5	5	0,00	5	0,00	6	0,00	7	0,00	8	0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terfasilitasinya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan	Jumlah pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	N/A	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	
3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan	3	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)												
3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				163.444.358,00		145.102.622,00		155.061.137,00		163.409.586,00		180.893.607,00	
Terfasilitasinya penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan di Kota Cimahi	Persentase pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil	N/A	100	163.444.358,00	100	145.102.622,00	100	155.061.137,00	100	163.409.586,00	100	180.893.607,00	
3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				163.444.358,00		145.102.622,00		155.061.137,00		163.409.586,00		180.893.607,00	
Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	5	5	163.444.358,00	5	145.102.622,00	5	155.061.137,00	5	163.409.586,00	5	180.893.607,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat				163.444.358,00		145.102.622,00		155.061.137,00		163.409.586,00		180.893.607,00	
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				2.244.592.728,00		4.619.173.000,00		4.820.280.808,00		4.979.008.491,00		5.389.610.669,00	
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				1.184.080.070,00		1.051.202.526,00		1.123.347.442,00		1.183.828.159,00		1.310.491.946,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	-	0,2	1.184.080.070,00	0,2	1.051.202.526,00	0,2	1.123.347.442,00	0,2	1.183.828.159,00	0,2	1.310.491.946,00	
	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (Persentase)	-	0,2		0,2		0,2		0,2				
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				1.184.080.070,00		1.051.202.526,00		1.123.347.442,00		1.183.828.159,00		1.310.491.946,00	
Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian	persentase pengawasan pengguna sarana pascapanen tanaman pangan yang dilakukan	N/A	100	1.184.080.070,00	100	1.051.202.526,00	100	1.123.347.442,00	100	1.183.828.159,00	100	1.310.491.946,00	
3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				170.556.000,00		179.083.800,00		188.037.990,00		197.439.890,00		207.311.884,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	0	1	170.556.000,00	1	179.083.800,00	1	188.037.990,00	1	197.439.890,00	1	207.311.884,00	
3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				142.050.000,00		149.152.500,00		156.610.125,00		164.440.631,00		172.662.663,00	
Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	0	1	142.050.000,00	1	149.152.500,00	1	156.610.125,00	1	164.440.631,00	1	172.662.663,00	
3.27.02.2.01.0005 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan				183.167.800,00		192.326.190,00		201.942.500,00		212.039.624,00		222.641.606,00	
Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	0	1	183.167.800,00	1	192.326.190,00	1	201.942.500,00	1	212.039.624,00		222.641.606,00	
3.27.02.2.01.0007 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura				388.306.270,00		215.640.036,00		246.006.827,00		262.620.514,00		343.223.918,00	
Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana	0	1	388.306.270,00	1	215.640.036,00	1	246.006.827,00	1	262.620.514,00	1	343.223.918,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	pengolahan hasil hortikultura (Laporan)												
3.27.02.2.01.0014 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan				300.000.000,00		315.000.000,00		330.750.000,00		347.287.500,00		364.651.875,00	
Terawasinya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	0	1	300.000.000,00	1	315.000.000,00	1	330.750.000,00	1	347.287.500,00	1	364.651.875,00	
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				2.274.066.285		2.274.066.285		2.274.066.285		2.274.066.285		2.274.066.285	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Meter)	N/A	1.000	1.944.066.285	1.000	1.944.066.285	1.000	1.944.066.285	1.000	1.944.066.285	1.000	1.944.066.285	
	Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan (persen)	N/A	3	330.000.000	3	330.000.000	3	330.000.000	3	330.000.000	3	330.000.000	
3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian				2.274.066.285		2.274.066.285		2.274.066.285		2.274.066.285		2.274.066.285	
Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian	Jumlah kawasan Lahan Pertanian yang Ditetapkan	1	1	1.944.066.285	1	1.944.066.285	1	1.944.066.285	1	1.944.066.285	1	1.944.066.285	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Menjadi LP2B (kawasan)												
	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1	1	330.000.000	1	330.000.000	1	330.000.000	1	330.000.000	1	330.000.000	
3.27.03.2.01.0009 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan				330.000.000		330.000.000		330.000.000		330.000.000		330.000.000	
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1	1	330.000.000	1	330.000.000	1	330.000.000	1	330.000.000	1	330.000.000	
3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota				1.944.066.285		1.944.066.285		1.944.066.285		1.944.066.285		1.944.066.285	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B yang dikelola (Dokumen)	30	1	1.944.066.285	1	1.944.066.285	1	1.944.066.285	1	1.944.066.285	1	1.944.066.285	
3.27.03.2.01.0017 - Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				0		0		0		0		0	
Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)			0		0		0		0		0	
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				967.898.095,00		859.280.506,00		918.253.652,00		967.692.176,00		1.071.230.476,00	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	100	100	967.898.095,00	100	859.280.506,00	100	918.253.652,00	100	967.692.176,00	100	1.071.230.476,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				715.000.000,00		750.750.000,00		788.287.500,00		827.701.875,00		869.086.969,00	
Terlaksananya pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner	Jumlah Retribusi Puskeswan	325.970.0 00	310.000.0 00	715.000.000,00	330.000.0 00	750.750.000,00	365.000.000	788.287.500,00	400.000.00 0	827.701.875,00	410.000.0 00	869.086.969,00	
	Jumlah Hewan yang dilayani Puskeswan	8007	7750		8000		8250		8500		8500		
3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner				715.000.000,00		750.750.000,00		788.287.500,00		827.701.875,00		869.086.969,00	
Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	1	1	715.000.000,00	1	750.750.000,00	1	788.287.500,00	1	827.701.875,00	1	869.086.969,00	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	100	100	967.898.095,00	100	859.280.506,00	100	918.253.652,00	100	967.692.176,00	100	1.071.230.476,00	
3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				187.898.095,00		40.280.506,00		58.303.652,00		64.744.676,00		123.135.601,00	
terlaksananya penjaminan kesehatan hewan	Jumlah Hewan yang divaksinasi Rabies :	1894	1300	187.898.095,00	1350	40.280.506,00	1375	58.303.652,00	1400	64.744.676,00	1425	123.135.601,00	
	Jumlah Hewan yang	968	600		625		650		675		700		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	divaksinasi flu burung :												
3.27.04.2.01.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis				0		0		0		0		0	
Terbentuknya kader zoonosis	Jumlah kader zoonosis (Orang)	N/A	75	0	75	0	75	0	75	0	75	0	
3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				187.898.095,00		40.280.506,00		58.303.652,00		64.744.676,00		123.135.601,00	
Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kot a (Laporan)	2	4	187.898.095,00	4	40.280.506,00	4	58.303.652,00	4	64.744.676,00	4	123.135.601,00	
3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				65.000.000,00		68.250.000,00		71.662.500,00		75.245.625,00		79.007.906,00	
Terlaksananya penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Jumlah Hewan Qurban yang Diperiksa	3613	3625	65.000.000,00	3650	68.250.000,00	3675	71.662.500,00	3700	75.245.625,00	3725	79.007.906,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah sampel produk asal hewan yang diperiksa	10	10		10		10		15		15		
	Jumlah kegiatan peningkatan kesdaran masyarakat terhadap kesmavet	1	1		1		1		1		1		
3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				65.000.000,00		68.250.000,00		71.662.500,00		75.245.625,00		79.007.906,00	
Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	N/A	2	65.000.000,00	2	68.250.000,00	2	71.662.500,00	2	75.245.625,00	2	79.007.906,00	
3.27.04.2.04.0008 - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Jumlah laporan masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (laporan)	N/A	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				9.109.629,00		8.087.346,00		8.642.387,00		9.107.691,00		10.082.169,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (%)	100	100	9.109.629,00	100	8.087.346,00	100	8.642.387,00	100	9.107.691,00	100	10.082.169,00	
3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				9.109.629,00		8.087.346,00		8.642.387,00		9.107.691,00		10.082.169,00	
Terfasilitasinya penerbitan izin usaha pertanian di Kota Cimahi	Jumlah rekomendasi kelayakan Usaha Pertanian	9	8	9.109.629,00	8	8.087.346,00	8	8.642.387,00	9	9.107.691,00	9	10.082.169,00	
3.27.06.2.01.0002 - Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				9.109.629,00		8.087.346,00		8.642.387,00		9.107.691,00		10.082.169,00	
Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah laporan rekomendasi Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	1	2	9.109.629,00	2	8.087.346,00	2	8.642.387,00	2	9.107.691,00	2	10.082.169,00	

Tabel 4.4
Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas
Pembangunan Daerah

PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(2)	(3)	(4)	(5)
2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	2.09.02.2.01 Keg. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
		2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
		2.09.03.2.01.0002 Sub Keg. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
		2.09.03.2.01.0011 – Sub Keg. Pemantauan Stok Pangan	
		2.09.03.2.01.0012 Sub Keg. Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	
		2.09.03.2.01.0016 – Sub Keg. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	

PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(2)	(3)	(4)	(5)
		2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
		2.09.03.2.04.0005 – Sub Keg. Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	2.09.04.2.01 – Keg. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
		2.09.04.2.01.0001 – Sub. Keg. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
		2.09.04.2.02.0002 – Sub Keg. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		2.09.04.2.02.0003 - Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	2.09.05.2.01 – Keg. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	

PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(2)	(3)	(4)	(5)
		2.09.05.2.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
		3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	2.09.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
		2.09.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	3.25.04.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		3.25.04.2.01.0001 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif,	

PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(2)	(3)	(4)	(5)
		serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	
		3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
		3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
		3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
		3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
		3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	

PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(2)	(3)	(4)	(5)
		3.27.02.2.01.0005 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
		3.27.02.2.01.0007 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
		3.27.02.2.01.0014 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
		3.27.03.2.01.0009 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	
		3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	

PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(2)	(3)	(4)	(5)
		3.27.04.2.01.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	
		3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
		3.27.04.2.04.0008 - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	
3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		3.27.06.2.01.0002 - Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kelembagaan unit pelaksana teknis (UPT). Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah mendorong UPTD. Puskeswan dan UPTD. Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) untuk bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Transformasi ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola keuangan yang lebih fleksibel, transparan, dan akuntabel, sehingga kedua UPTD. dapat memberikan pelayanan yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Upaya yang dilakukan Dispangtan antara lain melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan layanan, pengembangan standar operasional pelayanan yang terukur, serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada. Selain itu, Dispangtan juga mendorong diversifikasi layanan yang mampu meningkatkan pendapatan, seperti layanan kesehatan hewan kesayangan, vaksinasi, inseminasi buatan, laboratorium kesehatan hewan, hingga pengembangan usaha perikanan berbasis benih unggul.

Dengan adanya dukungan regulasi, pembinaan manajerial, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi, UPT. Puskeswan dan UPT.BBIAT diharapkan dapat memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan substansi menuju status BLUD. Ke depan, status BLUD akan memberikan ruang yang lebih luas bagi kedua UPT untuk mengembangkan inovasi pelayanan, meningkatkan kemandirian, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kurun waktu lima tahun mendatang, UPT. Puskeswan dan UPT. Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) Kota Cimahi ditargetkan dapat bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Target ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan publik di bidang kesehatan hewan, peternakan, dan perikanan, serta untuk mendukung kemandirian dan peningkatan kontribusi terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara bertahap, target yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan meliputi:

4. Tahun ke 1-2 :

- Penyusunan regulasi dan dokumen persyaratan administratif, teknis, dan substansi menuju BLUD;
- Peningkatan kapasitas SDM dalam manajemen pelayanan dan keuangan berbasis BLUD;
- Optimalisasi layanan dasar (vaksinasi, pemeriksaan hewan, inseminasi buatan, produksi benih unggul).

5. Tahun ke 2-3 :

- Diversifikasi layanan unggulan untuk meningkatkan pendapatan (klinik hewan kesayangan, sertifikasi kesehatan, laboratorium, penjualan benih unggul berkualitas);
- Peningkatan sarana prasarana pendukung pelayanan dan produksi;
- Penguatan sistem informasi pelayanan dan keuangan.

6. Tahun ke 3-4 :

- Peningkatan volume layanan dan jangkauan masyarakat penerima manfaat;
- Implementasi tata kelola keuangan dengan pola BLUD secara bertahap;
- Peningkatan kontribusi pendapatan UPT terhadap PAD.

7. Tahun ke 4-5 :

- UPT Puskesmas dan UPT BBIAT secara penuh beroperasi dengan status BLUD;
- Terwujudnya pelayanan yang profesional, mandiri, inovatif, dan berdaya saing;
- Meningkatnya kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta ketahanan pangan daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi menetapkan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025–2029 yang

terukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Target keberhasilan untuk periode Renstra 2025-2029, pencapaian sasaran strategis akan tercermin dari meningkatnya nilai indikator tujuan, antara lain:

1. **Indeks Ketahanan Pangan Daerah (IKP)** yang menunjukkan kemampuan daerah dalam menjamin ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan masyarakat, sebagai kontribusi terhadap sasaran kontribusi terhadap meningkatnya daya saing sumber daya manusia;
2. **Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PKPP)** yang menunjukkan persentase penduduk yang tingkat konsumsinya masih berada di bawah kebutuhan energi minimum yang dianjurkan;
3. **Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)** sebagai ukuran kesejahteraan pelaku utama sektor pangan dan pertanian dan perikanan dan juga sebagai kontribusi terhadap indikator sasaran meningkatnya kualitas pembangunan ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan sosial, dan;
4. **Indeks Reformasi Birokrasi terhadap Layanan Dinas Pangan dan Pertanian** sebagai tolok ukur kualitas pelayanan publik dan sebagai kontribusi terhadap sasaran meningkatnya meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Target Indikator Kinerja Utama Dispangtan untuk periode Renstra 2025-2029 bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan dan Pertanian
2025 - 2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Indeks Ketahanan Pangan (Pou)	Poin	88,68	88,80	88,9	89	89,1	89,2	88,80	
2.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	Persen	N/A	2,98	2,87	2,74	2,59	2,42	2,98	
3.	Skor PPH Ketersediaan	Skor	89,6	89,6	89,7	89,7	89,7	89,8	89,8	
4.	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dispangtan	Nilai	78,74	79	79,5	80	80,5	81	78,74	
5.	Rasio PDRB sektor Pertanian	Persen	0,19	0,11	0,106	0,102	0,098	0,094	0,11	
6.	Persentase kenaikan PDRB sektor pertanian	Persen	1,32	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,32	

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan urusan pangan, pertanian dan kelautan dan perikanan, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi menetapkan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025–2029 yang diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Kunci menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus instrumen untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pencapaian IKK Dinas Pangan dan Pertanian diarahkan untuk mendukung pemantapan ketahanan pangan, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan, serta perikanan, serta peningkatan kesejahteraan pelaku usaha tani/nelayan.

Adapun target-target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pangan dan Pertanian
2025 - 2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
1	Persentase jumlah cadangan pangan	Persentase	96,7	98	100	100	100	100	100	
2	Jumlah total cadangan pangan pemerintah (beras) terhadap jumlah ketersediaan /kebutuhan pangan dalam daerah (Ton)	Ton	50,26	55	55	57	59	61	63	
3	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	Unit	1	1	1	1	1	1	1	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Skor Pola Pangan Harapan (Konsumsi)	Nilai	90,1	90,2	90,2	90,3	90,4	90,5	90,6	
5	Jumlah Dokumen Analisis CV (Coeficient Varian) Bahan Pahan Pokok	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	
6	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	2	4	4	4	4	4	4	
7	Informasi Stok Pangan	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	
8	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	
9	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	
10	Persentase pelaksanaan pencapaian target konsumsi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pangan per kapita/tahun									
11	Jumlah Promosi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	4	4	4	4	4	4	4	
12	Cakupan wilayah informasi peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	Kecamatan	3	3	3	3	3	3	3	
13	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	
14	Cakupan wilayah penanganan kerawanan pangan	Wilayah	1	1	1	1	1	1	1	
15	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)									
16	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	
17	Persentase intervensi Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
18	persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Persentase	98	98	98	98	98	98	98	
19	Jumlah pengawasan keamanan	Kali	12	12	12	12	12	12	12	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pangan ke retail/pasar									
20	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	5	5	5	5	5	5	
21	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	
22	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	
23	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,12	84,12	84,4	84,7	84,95	85,25	85,5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dinas Pangan dan Pertanian									
24	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pangan dan Pertanian	Indeks	80	80	81	82	83	84	84	
25	Nilai SAKIP Dinas Pangan dan Pertanian	Nilai	77,9	77,9	78	78,25	78,5	78,75	79	
	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	290,3	290,3	290,5	290,6	290,7	290,8	290,9	
2	Persentase rekomendasi ijin usaha bidang Pembudidayaan ikan yang dilayani Tenaga Kerja Asing (Rekomendasi)	Persentase	N/A	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing (Rekomendasi)	Rekomendasi	N/A	5	5	5	5	5	5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Jumlah Pembudidaya ikan yang diberdayakan	Pembudidaya	15	16	17	18	19	20	20	
5	Jumlah benih ikan konsumsi	ekor	143750	145000	150000	155000	160000	165000	165000	
6	Jumlah produksi ikan hias	ekor	7780	7800	7900	8000	8100	8200	8200	
7	PAD yang dihasilkan	Rupiah	60472500	60500000	61710000	62920000	64130000	65340000	65340000	
8	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	
9	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	Unit	1	1	1	1	1	1	1	
10	Persentase pelaku usaha pembudidaya ikan yang	Persentase	N/A	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	diperiksa kepatuhannya									
11	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	51,18	51,18	51,2	51,2	51,3	51,3	51,4	
12	Luasan Kawasan Konservasi	Km ²	-	-	1	1	1	1	1	
13	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	Pelaku usaha	9	20	20	20	20	20	20	
14	Persentase pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil	Persentase	N/A	100	100	100	100	100	100	
15	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang	Rekomendasi	5	5	5	6	7	8	8	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Rekomendasi)									
16	Jumlah pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Kali	N/A	2	2	2	2	2	2	
17	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil	Unit usaha	3	5	5	5	5	5	5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)									
18	Persentase pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
19	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	Pelaku usaha	5	5	5	5	5	5	5	
	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
1	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase	N/A	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (Persentase)	Persentase	N/A	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
3	persentase pengawasan pengguna sarana pascapanen tanaman pangan yang dilakukan	Persentase	N/A	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	Laporan	N/A	1	1	1	1	1	1	
5	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung	Laporan	N/A	1	1	1	1	1	1	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pertanian (Laporan)									
6	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	Laporan	N/A	1	1	1	1	1	1	
7	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	Laporan	N/A	1	1	1	1	1	1	
8	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	Laporan	N/A	1	1	1	1	1	1	
9	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	N/A	1000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan (persen)	Persentase	N/A	3	3	3	3	3	3	
11	Jumlah kawasan Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Kawasan	1	1	1	1	1	1	1	
12	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	1	1	1	1	1	1	1	
13	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	Unit	1	1	1	1	1	1	1	
14	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L P2B, Kawasan Pertanian	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pangan Berkelanjutan/K P2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L CP2B yang dikelola									
15	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	100	100	100	100	100	100	100	
16	Jumlah Retribusi Puskesmas	Rupiah	325970000	310,000.000	330000000	365000000	400,000.000	410,000.000	410,000.000	
17	Jumlah Hewan yang dilayani Puskesmas	ekor	8007	7750	8000	8250	8500	8500	8500	
18	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	
19	Jumlah Hewan yang divaksinasi Rabies	ekor	1894	1300	1350	1375	1400	1425	1425	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Jumlah Hewan yang divaksinasi flu burung	ekor	968	600	625	650	675	700	700	
21	Jumlah kader zoonosis (Orang)	Orang	N/A	75	75	75	75	75	75	
22	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	Laporan	2	4	4	4	4	4	4	
23	Jumlah Hewan Qurban yang Diperiksa	ekor	3613	3625	3650	3675	3700	3725	3725	
24	Jumlah sampel produk asal hewan yang diperiksa	sample	10	10	10	10	10	10	10	
25	Jumlah kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	terhadap kesmavet									
26	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	Laporan	N/A	2	2	2	2	2	2	
27	Jumlah laporan masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (laporan)	Laporan	N/A	1	1	1	1	1	1	
28	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
29	Jumlah rekomendasi kelayakan Usaha Pertanian	Rekomendasi	9	8	8	8	8	8	8	
30	Jumlah laporan rekomendasi Kelayakan dan	Dokumen	1	2	2	2	2	2	2	

Indikator kinerja kunci (IKK) berperan penting dalam pencapaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian sebagai alat ukur, pendorong peningkatan kinerja, alat bantu perencanaan dan evaluasi, serta sarana akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan. IKK membantu dinas mengukur seberapa jauh sasaran strategisnya tercapai, memandu penyesuaian program agar selaras dengan visi misi, dan memfasilitasi inovasi untuk pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam jangka waktu lima tahun kedepan, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kelembagaan unit pelaksana teknis (UPT). Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah mendorong UPTD. Puskeswan dan UPTD. Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) untuk bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Transformasi ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola keuangan yang lebih fleksibel, transparan, dan akuntabel, sehingga kedua UPTD. dapat memberikan pelayanan yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Upaya yang dilakukan Dispangtan antara lain melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan layanan, pengembangan standar operasional pelayanan yang terukur, serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada. Selain itu, Dispangtan juga mendorong diversifikasi layanan yang mampu meningkatkan pendapatan, seperti layanan kesehatan hewan kesayangan, vaksinasi, inseminasi buatan, laboratorium kesehatan hewan, hingga pengembangan usaha perikanan berbasis benih unggul.

Dengan adanya dukungan regulasi, pembinaan manajerial, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi, UPT. Puskeswan dan UPT.BBIAT diharapkan dapat memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan substansi menuju status BLUD. Ke depan, status BLUD akan memberikan ruang yang lebih luas bagi kedua UPT untuk mengembangkan inovasi pelayanan, meningkatkan kemandirian, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mendukung ketahanan pangan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

Dalam kurun waktu lima tahun mendatang, UPT. Puskeswan dan UPT. Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) Kota Cimahi ditargetkan dapat bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Target ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan publik di bidang kesehatan hewan, peternakan, dan perikanan, serta untuk mendukung kemandirian dan peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara bertahap, target yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan meliputi:

8. Tahun ke 1-2 :

- Penyusunan regulasi dan dokumen persyaratan administratif, teknis, dan substansi menuju BLUD;
- Peningkatan kapasitas SDM dalam manajemen pelayanan dan keuangan berbasis BLUD;
- Optimalisasi layanan dasar (vaksinasi, pemeriksaan hewan, inseminasi buatan, produksi benih unggul).

9. Tahun ke 2-3 :

- Diversifikasi layanan unggulan untuk meningkatkan pendapatan (klinik hewan kesayangan, sertifikasi kesehatan, laboratorium, penjualan benih unggul berkualitas);
- Peningkatan sarana prasarana pendukung pelayanan dan produksi;
- Penguatan sistem informasi pelayanan dan keuangan.

10. Tahun ke 3-4 :

- Peningkatan volume layanan dan jangkauan masyarakat penerima manfaat;
- Implementasi tata kelola keuangan dengan pola BLUD secara bertahap;
- Peningkatan kontribusi pendapatan UPT terhadap PAD.

11. Tahun ke 4-5 :

- UPT Puskeswan dan UPT BBIAT secara penuh beroperasi dengan status BLUD;
- Terwujudnya pelayanan yang profesional, mandiri, inovatif, dan berdaya saing;

Dengan roadmap ini, diharapkan pada akhir periode lima tahun, UPT Puskesmas dan UPT BBIAT tidak hanya mampu memenuhi persyaratan BLUD, tetapi juga menjadi contoh unit kerja yang berhasil mengembangkan inovasi pelayanan publik sekaligus mendukung visi pembangunan daerah di bidang pangan, pertanian, dan perikanan.

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pangan dan pertanian selama periode lima tahun. Dokumen ini disusun secara sistematis berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal, isu strategis daerah, serta arah kebijakan pembangunan daerah yang sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Keseluruhan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra diarahkan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan, serta perikanan yang berdaya saing, serta peningkatan kesejahteraan pelaku utama dan masyarakat. Pencapaian tersebut diwujudkan melalui strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang terukur, dengan dukungan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur keberhasilan.

Dengan Renstra ini, Dinas Pangan dan Pertanian berkomitmen untuk:

- Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan masyarakat yang bergizi seimbang;
- Mengembangkan potensi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai penggerak perekonomian daerah;
- Mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya petani, peternak dan pembudidaya ikan, agar lebih produktif dan sejahtera;
- Memperkuat kelembagaan, inovasi, serta kualitas pelayanan publik.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025–2029 didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Kaidah pelaksanaan Renstra menjadi landasan agar setiap tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, efektif, dan selaras dengan visi-misi Kepala Daerah serta kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.

Dalam pelaksanaannya dokumen Renstra ini berpedoman kepada beberapa kaidah utama yaitu :

- Keterpaduan, seluruh program dan kegiatan selama periode Renstra terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik RPJMD, RKPD, maupun Renja perangkat daerah;
- Keterukuran – setiap sasaran dan target kinerja dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang jelas, sehingga capaian kinerja dapat dievaluasi secara obyektif;
- Efisiensi dan efektivitas – pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal, tepat sasaran, dan memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat;
- Partisipatif – mendorong keterlibatan aktif para pemangku kepentingan (stakeholders), baik masyarakat, pelaku usaha, maupun lembaga terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan;
- Akuntabilitas dan transparansi – setiap tahapan pelaksanaan Renstra harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, maupun finansial serta terbuka bagi pengawasan publik.

5.3. Pengendalian dan evaluasi

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025–

2029. Keduanya berfungsi untuk memastikan agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target yang telah ditetapkan. Pengendalian Renstra dilaksanakan melalui mekanisme pemantauan secara periodik terhadap capaian kinerja, pelaksanaan kegiatan, penyerapan anggaran, serta kepatuhan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.

Evaluasi Renstra dilakukan secara berkala untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan mampu mencapai tujuan dan sasaran strategis. Evaluasi mencakup:

- Evaluasi tahunan, yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) perangkat daerah;
- Evaluasi tengah periode, untuk melihat konsistensi pelaksanaan Renstra dengan kondisi aktual pembangunan daerah;
- Evaluasi akhir periode, untuk menilai capaian akhir Renstra dan menjadi bahan penyusunan Renstra periode berikutnya.

Hasil pengendalian dan evaluasi digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, penyesuaian program/kegiatan, serta penyempurnaan perencanaan pembangunan pada periode selanjutnya. Dengan demikian, Dinas Pangan dan Pertanian dapat menjaga konsistensi pelaksanaan Renstra, meningkatkan kualitas kinerja, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan ketahanan pangan, produksi dan produktivitas pertanian, berkontribusi terhadap PAD dan tentunya meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kota Cimahi.